

**Analisis Pengaruh Kompleks Fragmentasi Kerja Berbasis Platform Online dan Faktor  
Struktural Penghindaran Pajak dalam Shadow Economy  
Pada Gig Economy**

**ARTIKEL THESIS**



**DISUSUN OLEH:**

**SETIYA JULIANINGSIH**

**122300926**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**

**YOGYAKARTA**

**2025**



## **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA**

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010  
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

### **Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

#### **ANALISIS PENGARUH KOMPLEKS FRAGMENTASI KERJA BERBASIS PLATFORM ONLINE DAN FAKTOR STRUKTURAL PENGHINDARAN PAJAK DALAM SHADOW ECONOMY PADA GIG ECONOMY**

diajukan untuk diuji pada tanggal 1 Agustus 2025, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijasah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Atika Jauharita Hatta H, M.Si., Ak., CA

Saksi 3, sebagai Pembimbing 1

Prof. Dr. Djoko Susanto, M.Si., CMA, Ak., CA.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025

Yang memberi pernyataan

Setiya Julianingsih

Saksi 4, sebagai Pembimbing 2

Prof. Dr. Baldrick Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 5, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta





## UJIAN TESIS

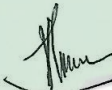
Tesis berjudul:

ANALISIS PENGARUH KOMPLEKS FRAGMENTASI KERJA BERBASIS PLATFORM ONLINE DAN  
FAKTOR STRUKTURAL PENGHINDARAN PAJAK DALAM SHADOW ECONOMY PADA GIG  
ECONOMY

Telah diuji pada tanggal: 1 Agustus 2025

Tim Penguji:

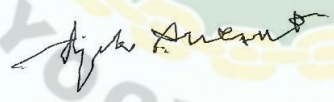
Ketua

  
Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Anggota

  
Dr. Atika Jauharia Hatta H, M.Si., Ak., CA

Pembimbing 1

  
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.Si., CMA, Ak., CA.

Pembimbing 2

  
Prof. Dr. Baldrice Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

## Analisis Pengaruh Kompleks Fragmentasi Kerja Berbasis Platform Online dan Faktor Struktural Penghindaran Pajak dalam Shadow Economy Pada Gig Economy

Setiya Julianingsih<sup>1</sup>, Baldric Siregar<sup>2</sup>, Djoko Susanto<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Daerah Istimewa Yogyakarta

### ABSTRAK

Paradigma baru dari ekonomi tradisional ke digital telah memunculkan fenomena gig economy yang ditandai dengan bentuk pekerjaan yang fleksibel, kontrak jangka pendek, dan penggunaan platform digital sebagai perantara antara pekerja dan konsumen. Meskipun berpotensi meningkatkan inklusivitas tenaga kerja dan efisiensi ekonomi, fenomena ini juga dapat memperbesar shadow economy, yang menyebabkan hilangnya pendapatan pemerintah, distorsi pasar, dan ketidakstabilan ekonomi. Namun demikian, terdapat kekurangan penelitian empiris yang mengkaji dampak fragmentasi pekerjaan online terhadap shadow economy. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Data penelitian merupakan data panel yang terdiri dari 934 observasi dari berbagai negara antara tahun 2013 dan 2023. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kelengkapan data dari lembaga-lembaga terkemuka seperti *World Bank*, *IMF*, *ILO*, dan *Transparency International*. Analisis regresi dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji signifikansi dampak variabel independen yaitu *unemployment*, *GDP*, *inflation*, *export*, *corruption* dan *online work fragmentation* terhadap *shadow economy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *GDP* dan *inflation* berdampak negatif signifikan terhadap *shadow economy*, sementara *unemployment*, *corruption*, dan *export* memberikan pengaruh positif signifikan. Sedangkan *online work fragmentation* (OWF) tidak terbukti memiliki dampak signifikan terhadap *shadow economy* dalam konteks global. Implikasi kebijakan dari studi ini menyoroti perlunya memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengawasan fiskal untuk memitigasi dampak ekonomi bayangan, terutama di negara-negara berkembang yang sedang mengalami pergeseran ekonomi transformatif digital.

Kata kunci: *gig economy*, *unemployment*, *GDP*, *inflation*, *export*, dan *corruption*, *online work fragmentation*, *shadow economy*,

### PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah mendorong lahirnya *Gig Economy*, yaitu ekosistem kerja berbasis Perubahan ekonomi tradisional ke digital menciptakan inovasi baru dalam hubungan kerja dan sistem produksi. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah *Gig Economy*, sebuah ekosistem dengan karakteristik kerja berbasis fleksibilitas, keterhubungan secara digital serta berbasis proyek jangka pendek (Wood et al., 2019). Dalam model ini, pekerjaan tidak terikat secara formal dengan pemberi kerja tetapi dengan melalui aplikasi yang berfungsi sebagai perantara dengan konsumen. Meskipun gig economy memiliki sifat inklusif dalam hal partisipasi tenaga kerja, efisiensi ekonomi, serta pemberdayaan perempuan, terdapat kerawanan dalam segi dampak yang lebih mendasar yaitu terhadap pengangguran, fragmentasi pekerjaan, dan juga ketidakstabilan pendapatan, hilangnya perlindungan sosial, kepatuhan fiskal, serta parahnya kesenjangan yang menyusun struktur-struktur domestik. Dalam hal ini berisiko kuat berkontribusi memperlebar kesenjangan antara kecepatan pertumbuhan ekonomi digital dengan ekspansi shadow economy atau ekonomi bayangan (Ishchuk et al., 2024).

Fenomena *online work fragmentation* (OWF) menggambarkan bagaimana pekerjaan di platform digital dibagi menjadi tugas-tugas kecil dan terpisah yang dilakukan oleh banyak pekerja secara individual. Jenis fragmentasi ini terjadi, tidak hanya pada tingkat tugas, tetapi juga pada tingkat kontrol sistemik, relasional, dan struktur kerja terdesentralisasi (Wood et al., 2019). Pekerja platform online, misalnya, seringkali

tidak bekerja di bawah satu entitas pengendali tunggal. Sebaliknya, mereka beroperasi dalam jaring kontrol yang rumit yang menampilkan banyak platform online, kontraktor pihak ketiga eksternal, dan pengawasan algoritmik kompleks yang sangat mengurangi otonomi mereka. Model ini menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, tetapi juga menghasilkan keadaan yang tidak aman di mana pekerja tidak memiliki pendapatan yang stabil dan kurang perlindungan sosial. Kondisi semacam itu menimbulkan gagasan tentang hubungan erat antara ekspansi ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi bayangan (Malik et al., 2021).

Ekonomi bayangan terdiri dari aktivitas ekonomi legal yang dengan sengaja tidak dilaporkan kepada otoritas publik dengan tujuan menghindari pajak, kontribusi jaminan sosial, atau regulasi tenaga kerja (Remeikienė et al., 2022). Kehadiran ekonomi bayangan menyebabkan kerugian berat dalam pendapatan negara, menciptakan distorsi pasar, melemahkan perlindungan sosial, dan akhirnya merusak stabilitas serta kesetaraan ekonomi (Malik et al., 2021). Karena alasan itu, menganalisis determinan ekonomi bayangan dalam konteks ekonomi digital baru menjadi krusial karena dinamika angkatan kerja tidak lagi sepenuhnya terkatakan dalam definisi tradisional tentang pekerjaan formal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai determinan ekonomi bayangan dari sudut pandang ekonomi makro dan kelembagaan. Nchor (2021), Schneider (2022), Abada et al., (2021), Tran (2021). Menemukan bahwa Tingkat pengangguran berkontribusi secara positif terhadap ukuran *shadow economy*, karena pengangguran

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendorong individu ke dalam pekerjaan informal dan sektor non. Penelitian dilakukan oleh Ginevicius et al., (2020) dan Poufinas et al., (2021) mengungkapkan bahwa PDB per kapita dipandang sebagai proksi kesejahteraan, yang secara umum berkorelasi negatif dengan ekonomi bayangan. Negara dengan pendapatan per kapita tinggi biasanya memiliki daya beli yang lebih besar, akses layanan publik yang lebih baik, serta sistem fiskal yang lebih efisien. Namun, Schneider (2022) dan Kibona (2024) menunjukkan bahwa korelasi tersebut bersifat kontekstual, tergantung pada struktur distribusi pendapatan dan kualitas kelembagaan.

Faktor kelembagaan lainnya seperti efektivitas administrasi publik dan tingkat korupsi juga diketahui berkorelasi dengan ekonomi bayangan. Manajemen publik yang buruk dan korupsi yang merajalela menurunkan kepercayaan pada lembaga, sehingga mendorong pelaku ekonomi semakin menjauh dari sistem formal Achim et al., (2019), Yefimenko and Dobomenko, (2024) dan Kristianto (2021). Variabel ekspor digunakan untuk menangkap keterbukaan suatu ekonomi. Penelitian Poufinas et al., (2021) menunjukkan bahwa partisipasi di pasar internasional cenderung mengekang kegiatan informal karena operator bisnis perlu memenuhi standar internasional. Inflasi, sebagai tanda ketidakstabilan ekonomi, dianggap memberikan lebih banyak peluang untuk transaksi informal karena perubahan harga atau fluktuasi yang tajam diungkapkan oleh Tran (2021) dan Kravchenko et al., (2022).

Meskipun determinan struktural tersebut telah banyak diteliti, dampak lanjutan dari revolusi digital dan ekonomi berbasis platform online terhadap *shadow economy* masih minim perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan eksponensial dalam pekerjaan digital berbasis aplikasi seperti pengemudi transportasi daring, kurir pengiriman, pekerja lepas digital, dan penyedia jasa berbasis teknologi. Pekerjaan ini sering kali berlangsung tanpa kontrak kerja formal, tanpa jaminan sosial, dan berada di luar kerangka pengawasan ketenagakerjaan resmi. Studi oleh Schneider (2022) dan Remeikienė et al. (2022) menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat memperdalam ekspansi sektor informal. Namun, belum terdapat analisis kuantitatif sistematis yang secara empiris mengevaluasi kontribusi pekerjaan digital terhadap *shadow economy*.

Selain itu, mayoritas literatur yang ada berfokus pada pendekatan makroekonomi klasik untuk mempelajari ekonomi bayangan, sementara struktur baru yang melengkapi realitas digital masih terbatas. Sementara itu, karakteristik fragmentasi pekerjaan di

dunia digital secara fundamental berbeda dari informalitas tradisional, membutuhkan pendekatan baru untuk pengukuran dan analisis. Kurangnya pengembangan metrik kuantitatif untuk mengukur fragmentasi pekerjaan platform online merupakan salah satu hambatan utama dalam mengintegrasikan ekonomi digital ke dalam model ekonomi bayangan.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, studi ini menyusun dan mengoperasionalkan *online work fragmentation* (OWF) sebagai indikator kuantitatif dari fragmentasi pekerjaan dalam ekonomi digital. Indeks ini dibangun berdasarkan dimensi pekerjaan platform online seperti pekerjaan informal, jam kerja fleksibel, ketidakhadiran perlindungan sosial, dan kontrak berbasis aplikasi. Dengan memasukkan OWF studi ini bertujuan untuk memberikan estimasi yang lebih menyeluruh dan ilmiah tentang ukuran dan determinan ekonomi bayangan, terutama di era digital.

Pada Penelitian sebelumnya, hampir semua riset tentang ekonomi bayangan hanya meneliti sekelompok negara besar yang tergolong berkembang, padahal masing-masing negara dalam kelompok itu punya ciri ekonomi yang sangat berbeda. Namun, seiring dengan semakin rumitnya sistem ekonomi dunia, penting bagi para peneliti untuk menjangkau hampir semua negara agar dapat melihat sebaran, penyebab, dan dampak sektor informal itu dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang unik. Cakupan global memudahkan perbandingan yang lebih lengkap, tetapi juga menyediakan landasan empiris yang solid bagi pembuat kebijakan internasional ketika mereka merumuskan langkah-langkah praktis untuk menangani ekonomi bayangan.

Dengan latar belakang tersebut, studi ini berusaha mengukur dan menganalisis sektor tersebut di seluruh dunia, sekaligus meneliti seberapa jauh mempengaruhi aktivitas *shadow economy* di setiap negara. Kami berharap temuan ini memberi pemahaman luas tentang fenomena itu dan, pada gilirannya, membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap perekonomian global. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan teoritis dan metodologis dalam studi ekonomi bayangan, sekaligus memberikan kontribusi praktis yang substansial kepada pembuat kebijakan. Di tingkat nasional. *Online work fragmentation* (OWF) diharapkan dapat menciptakan indikator relevan baru dalam statistik ketenagakerjaan dan fiskal yang bertujuan untuk memenuhi tantangan transisi digital yang sedang berlangsung di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

## KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Definisi dan Konsep *Shadow Economy* (Ekonomi Bayangan)

*Shadow economy*, atau ekonomi bayangan, didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan secara sah maupun tidak sah, tetapi tidak tercatat dalam sistem statistik nasional dan tidak masuk dalam perhitungan resmi Produk Domestik Bruto

(PDB). Aktivitas ini meliputi produksi dan perdagangan barang serta jasa yang sengaja disembunyikan dari otoritas pajak dan pemerintah untuk menghindari kewajiban pajak dan regulasi (Schneider, 2022). Dengan demikian, *shadow economy* mencakup kegiatan legal yang tidak dilaporkan serta aktivitas ilegal yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Kristianto (2021), *shadow economy* merupakan bagian penting dari perekonomian yang tidak tercatat secara resmi namun tetap berkontribusi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap perputaran ekonomi nasional. *Shadow economy* diartikan sebagai aktivitas yang sengaja tidak diungkapkan kepada otoritas terkait untuk menghindari pajak, regulasi, dan kewajiban administratif lainnya (Schneider, 2022). Aktivitas ini dapat berupa usaha mikro dan kecil yang beroperasi secara informal tanpa izin resmi maupun aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan.

Dampak *Shadow economy* khususnya sangat parah dalam menggembosi potensi penerimaan pajak bagi suatu negara. Hilangnya penerimaan pajak dari ekonomi bayangan dapat mencapai triliunan Rupiah setiap tahunnya, yang membatasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lebih jauh, keberadaan ekonomi bayangan bersifat anti persaingan karena pelaku informal tidak membayar pajak, yang mengalihkan beban kepada pelaku usaha formal yang patuh (Lestari et al., 2022). Hal ini juga dapat melemahkan lembaga negara yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.

Faktor-faktor yang berkembang untuk ekonomi bayangan meliputi beban pajak yang tinggi, regulasi yang kompleks, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya tingkat korupsi (Kristianto, 2021). Banyak pelaku usaha memilih untuk beroperasi secara informal karena biaya untuk memperoleh izin dan membayar pajak dianggap mahal. Ketidakstabilan politik yang dipadukan dengan korupsi memperburuk situasi ini, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Azhar and Sohibien, 2021).

Penanganan ekonomi bayangan memerlukan reformasi kebijakan pajak, peningkatan transparansi, dan kerja sama antarlembaga di tingkat pemerintah (Azhar and Sohibien, 2021). Secara garis besar, ekonomi bayangan merupakan fenomena multifaset yang melibatkan aktivitas legal dan ilegal yang tidak tercatat secara resmi dan memiliki konsekuensi luas terhadap penerimaan pajak, persaingan usaha, dan stabilitas ekonomi nasional. Remeikienė et al., (2022) menyoroti bahwa menjadi penting untuk mengatasi masalah agar ekonomi bayangan lebih terlihat dalam mengubah transparansi negara, penerimaan pajak, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Schneider, 2022).

## Perbedaan Ekonomi Informal dan Ekonomi Bawah Tanah

Ekonomi informal dan ekonomi bawah tanah merupakan dua konsep yang berbeda subjek. Keduanya berada dalam cakupan *shadow economy*. Ekonomi informal merujuk kepada aktivitas ekonomi yang bersifat legal namun tidak secara resmi terdaftar didalam sistem administrasi pemerintah, seperti usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar didalam perpajakan. Ekonom informal cenderung tidak mendaftarkan usahanya karena dianggap memberatkan oleh biaya administrasi dan perpajakan (Schneider, 2022). Contoh ekonomi informal adalah pedagang kaki lima, tukang ojek pangkalan, atau pekerja lepas yang menerima pembayaran tunai tanpa pencatatan resmi. Selain itu, sektor informal juga memiliki kontribusi

yang cukup besar dalam menyerap angkatan kerja serta menyuplai di negara berkembang seperti Indonesia (Lestari et al., 2022).

Di sisi lain, ekonomi bawah tanah (*underground economy*) merupakan aktivitas ilegal yang melanggar hukum dan tidak ada catatan dalam sistem resmi. Aktivitas ini meliputi segala aktivitas seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, perjudian ilegal dan praktek-praktek kriminal lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada regulasi dan pengawasan dari pemerintah (Gërxhani and Cichocki, 2023). Walaupun tanpa pengawasan yang akurat, illegal economy atau ekonomi bawah tanah masih bisa diestimasi dan diukur berdasarkan beberapa konteks tertentu.

*Shadow economy* secara keseluruhan mencakup kedua kategori ini, sehingga aktivitas yang tidak tercatat bisa berasal dari sektor informal yang legal maupun sektor bawah tanah yang ilegal (Schneider, 2022). Hal yang membedakan satu dengan yang lain adalah status hukum kegiatannya, ekonomi informal tidak terdaftar namun masih dalam batasan hukum, sedangkan ekonomi bawah tanah sama sekali tidak sesuai dengan hukum dan sering menimbulkan risiko hukum bagi para pelakunya. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan dan mitigasi dampak ekonomi bayangan terhadap perekonomian nasional..

## Dampak *Shadow economy*

Ekonomi bayangan berdampak besar pada kebijakan keuangan dan tata kelola masyarakat, baik secara kompleks maupun signifikan. Karena aktivitas dalam *shadow economy* tidak terdeteksi, pemerintah kehilangan banyak potensi penerimaan pajak, yang pada gilirannya menghambat ruang fiskal untuk layanan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta belanja perawatan kesehatan (Rezky, 2021). Misalnya, ada potensi hilangnya penerimaan pajak bagi negara dari kegiatan ekonomi seperti e-commerce yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian Rezky (2021) juga menekankan bahwa keberadaan ekonomi bayangan mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak yang sangat besar yang berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik.

Selain itu, *shadow economy* menurunkan efisiensi regulasi dan pengawasan pemerintah. Karena sebagian kegiatan ekonomi berada di luar ekonomi formal, hal itu membuat pemerintah lebih lemah dalam mengendalikan dan mengelola ekonomi secara keseluruhan yang berujung pada ketidakadilan sosial. Beberapa pelaku ekonomi di sektor bayangan tidak memberikan kontribusi yang sepadan terhadap penerimaan negara sehingga beban fiskal yang ditanggung oleh pelaku usaha formal yang patuh menjadi semakin berat (Lestari et al., 2022). Kondisi ini memperburuk kesenjangan sosial ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah.

Dampak *shadow economy* antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berimbang. Minimnya transparansi dan tanggung

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jawab dalam kegiatan ekonomi bayangan menyebabkan terjadinya distorsi data yang dapat melemahkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter (Bytyçi et al., 2021). Rasio pajak Indonesia sangat rendah, yakni sekitar 10,4% pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata negara berkembang dan OECD. Hal ini juga mencerminkan adanya kesenjangan penerimaan pajak akibat ekonomi bayangan (Syarifullah, 2025; OECD, 2022).

Oleh karena itu, pengendalian *shadow economy* sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperkuat kelembagaan, dan mendorong pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan (Remeikienė et al., 2022). Namun, kesenjangan masih cukup signifikan dan memerlukan kebijakan yang progresif, inklusivitas, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak dari masyarakat (Azhar and Sohibien, 2021).

## Penyebab Ekonomi Bayangan

Tingginya angka kemiskinan termasuk salah satu dari banyak faktor yang akan mempengaruhi bagaimana individu berpartisipasi dalam *shadow economy*. Hal tersebut terjadi karena dengan sedikitnya kesempatan bagi individu untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal, maka mereka akan berusaha mencari *passive income* di sektor informal. Kondisi ini diperburuk oleh '*underemployment*' yang mengacu pada orang yang bekerja di bawah kemampuan mereka dan atau di luar jam kerja dan pendapatan yang memadai, sehingga cenderung mencari pemasukan tambahan di luar pekerjaan utama mereka dalam sektor informal (Gërxhani and Cichocki, 2023).

Hal ini menjadi masalah serius karena sektor informal kerap kali gagal memberikan perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan yang memadai. Selain itu, minimnya kesempatan kerja formal juga disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta terbatasnya kemampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja baru (Gërxhani and Cichocki, 2023). Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang memilih untuk tetap beroperasi secara informal karena dianggap terbebani oleh kewajiban regulasi dan perpajakan yang tidak proporsional, sehingga memaksa mereka untuk "*exit option*" dan terjun ke ekonomi bayangan. Situasi ini semakin memperkuat eksistensi ekonomi bayangan sebagai alternatif utama penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam konteks ini, ekonomi bayangan berperan sebagai penyelamat pengangguran dengan menyediakan kesempatan kerja mandiri dan sumber pendapatan alternatif, khususnya di sektor usaha mikro dan informal (Gërxhani and Cichocki, 2023). Namun, keberadaan ekonomi bayangan membawa risiko besar bagi perekonomian nasional, termasuk hilangnya potensi penerimaan pajak, distorsi data ekonomi, dan persaingan tidak sehat.

## PDB

Hubungan pendapatan per kapita memiliki korelasi terbalik dengan ketergantungan pada ekonomi bayangan, di mana peningkatan taraf hidup yang

tercermin dalam pendapatan per kapita cenderung menurunkan proporsi kegiatan ekonomi bayangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, peningkatan pendapatan per kapita biasanya diiringi dengan peningkatan pendidikan, akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan formal, serta kesadaran pajak yang lebih besar, sehingga masyarakat dan bisnis cenderung beroperasi di sektor formal (Nchor, 2021).

Kedua, tingkat pendapatan per kapita rata-rata memungkinkan pengusaha menanggung biaya administrasi dan pajak yang sebelumnya dianggap memberatkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, namun, ada tren penurunan ketergantungan pada ekonomi bayangan seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita, sementara sektor informal tetap ada, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala struktural seperti regulasi yang kompleks, biaya formalitas yang tinggi, dan akses yang mudah ke sistem perpajakan dan perizinan (Schneider, 2022). Peningkatan pendapatan per kapita juga berdampak pada perubahan struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Perubahan perilaku sosial yang disertai peningkatan pendapatan, masyarakat cenderung beralih ke pekerjaan sektor formal yang dikaitkan dengan jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. Meski demikian, sektor informal tetap menjadi pilihan utama sebagian besar pekerja karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan formal (Ginevicius et al., 2020).

Pertumbuhan PDB per kapita membantu mengurangi ketergantungan pada ekonomi bayangan sampai batas tertentu karena meningkatnya taraf hidup dan kesadaran akan perlunya formalisasi kegiatan ekonomi. Namun, faktor struktural dan regulasi masih tetap menjadi hambatan utama yang secara signifikan memungkinkan sektor informal bertahan.

## Korupsi

Korupsi memiliki kaitan erat dengan persepsi ketidakadilan pajak dan partisipasi dalam ekonomi bayangan. Ketika masyarakat menganggap sistem perpajakan tidak adil karena adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak, mereka cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berpartisipasi dalam ekonomi bayangan (Rezky, 2021). Persepsi yang dianggap tidak adil ini menimbulkan sikap apatis atau bahkan resistensi terhadap kepatuhan fiskal, sehingga menciptakan lebih banyak ruang bagi kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dan tidak dikenakan pajak (Lestari et al., 2022).

Dampak korupsi terhadap kepatuhan pajak sangat berdampak. Korupsi melemahkan lembaga perpajakan dan birokrasi, yang membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi lemah (Rezky, 2021). Akibatnya, pelaku bisnis yang patuh menderita beban pajak, sementara pelaku ekonomi bayangan tidak membayar pajak yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan distorsi dalam perekonomian (Lestari et al., 2022). Selain itu, kegagalan kebijakan pemerintah yang

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendapat perhatian signifikan tidak ditutup-tutupi lebih jauh lagi mengurangi penghargaan publik yang tidak diberikan kepada dana rezim yang bersifat xenomorfik, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dalam konteks sektor formal, korupsi menambah beban ganda bagi pelaku usaha formal, mereka harus membayar pajak secara penuh dan pada saat yang sama menghadapi praktik korupsi yang menambah biaya operasional (Lestari et al., 2022). Hal ini mendorong beberapa pelaku usaha formal untuk beralih ke sektor ekonomi informal atau ekonomi bayangan untuk menghindari beban tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korupsi tidak hanya mengurangi penerimaan pajak pemerintah tetapi juga merusak struktur ekonomi formal dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sehat.

## Inflasi

Inflasi memiliki dampak yang cukup negatif terhadap sektor informal, termasuk perjudian, yang menggunakan sistem pembayaran yang dipatok berdasarkan pembelian. Rendahnya daya beli secara agregat tidak merefleksikan pengeluaran. Penurunan daya beli ini membuat masyarakat berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk perjudian yang biasanya bersifat konsumtif, tidak produktif, dan masih dalam tahap adiksi.

Secara umum hubungan antar inflasi dengan perjudian yang diklasifikasikan di bawah umbra informal maupun shadow economy, inflasi terkikis secara langsung meliputi kemungkinan penganggaran. Seiring dengan itu adanya standar nilai emas, terjadi menghilangnya pelosok suatu negara. Disisi lain, inflasi secara tidak langsung memaksa kelompok terdampak mempunyai pilihan mengkaji kembali pegangan kekayaan yang berisikan usaha untuk dilego dianggap paling lemah, di pasar bebas khususnya untuk melakukan perjudian ini dapat dibenarkan (Tran, 2021).

Inflasi mengakibatkan peningkatan biaya produksi pada subsektor usaha mikro dan kecil yang paling banyak terdapat pada sektor informal. Situasi ini berpotensi menurunkan omzet serta kelangsungan usaha mereka (Kravchenko et al., 2022). Kondisi ini memaksa pelaku usaha di sektor informal untuk merumuskan opsi baru dalam menaikkan harga atau mengurangi volume transaksi, yang juga mempengaruhi pola transaksi di sektor informal, termasuk perjudian yang bergantung pada nilai tetap.

Inflasi secara rata-rata mempengaruhi seluruh jenis transaksi sektor informal dengan mengurangi daya beli yang tersedia serta menambah biaya produksi di sektor informal, dan berpotensi mengurangi volume transaksi perjudian yang dipatok pembelian. Namun, dampak ini tentu juga akan berbeda tergantung pada keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta seberapa besar sektor informal mampu beradaptasi dengan perubahan harga.

## Ekspor

Kegiatan perdagangan internasional, khususnya ekspor, memiliki dampak yang cukup besar terhadap ekonomi bayangan dan kaitannya dengan

kepatuhan terhadap persyaratan formal yang lebih ketat terkait perdagangan lintas batas. Perdagangan internasional memberikan otonomi tertentu kepada pelaku bisnis untuk beroperasi dalam batas-batas formal perdagangan internasional melalui peluang bisnis global.

Achim et al., (2019) menyatakan bahwa regulasi yang rumit dan biaya kepatuhan yang tinggi dapat mendorong pengusaha untuk menghindari struktur formal dan beroperasi dalam sektor yang tidak diatur. Kegiatan ekonomi seperti perdagangan atau ekspor dilakukan di luar ekonomi formal. Hal ini merupakan akibat dari beban pajak yang berlebihan dan kerangka regulasi yang rumit yang mengakibatkan pengusaha berusaha mencari cara untuk menghindari kewajiban formal. Selain itu, rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum juga memperbesar peluang kegiatan ekonomi informal dalam perdagangan internasional.

Namun, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan internasional formal berpotensi untuk secara efektif mengekang ekonomi bayangan. Pemerintah dapat mengurangi insentif bagi para pengusaha untuk beroperasi secara informal dengan meningkatkan kualitas administrasi publik, meningkatkan pengawasan bea cukai, dan menyederhanakan prosedur ekspor-impor (Kristianto, 2021). Lebih jauh, transparansi dan digitalisasi proses perdagangan memungkinkan peningkatan akuntabilitas sekaligus meminimalkan korupsi yang memicu ekonomi bayangan. Pada hakikatnya, perdagangan internasional itu sendiri berpotensi untuk mengkatalisasi pengurangan ekonomi bayangan, asalkan ada regulasi dan pengawasan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, dampak buruk dari regulasi yang kompleks dan biaya kepatuhan yang tinggi disertai dengan pengawasan yang tidak memadai cenderung memperluas peluang kegiatan ekonomi bayangan di sektor impor dan ekspor.

## Fragmentasi Pekerjaan Platform Online

Pekerjaan berbasis platform online adalah jenis pekerjaan digital di mana sebuah sistem digital berfungsi sebagai perantara antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Sebuah platform digital adalah sistem atau infrastruktur teknologi yang menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan untuk berinteraksi dan berfungsi bersama serta memungkinkan interaksi dan transaksi yang efisien bagi banyak pengguna (Schneider, 2022). Beberapa contoh populer dari platform digital termasuk e-commerce, layanan pemesanan tumpangan, layanan pengantaran makanan, dan pasar freelance.

Jenis pengelompokan ini memiliki karakteristik kerja yang otomatis dan sangat fleksibel, sering disebut sebagai fleksibilitas tinggi, total independensi untuk mengendalikan waktu, tempat, dan jenis kegiatan kerja yang akan dilakukan. Di sisi lain, jenis fleksibilitas ini menciptakan fragmentasi dalam pekerjaan, tugas atau kontrak sementara tanpa perlindungan sosial atau pendapatan jangka panjang yang disebut perlindungan sosial, dan mengurangi keamanan (Schneider, 2022).

Baru-baru ini, inovasi digital yang muncul telah mengubah secara mendasar arsitektur pasar tenaga

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kerja. Ketersediaan internet yang luas dan platform lainnya telah mendorong pertumbuhan sektor informal seperti tidak pernah sebelum ini. Banyak pekerjaan yang diterima secara formal atau tradisional.

## Frakmentasi Kerja Platform Online dan Dampak terhadap Sektor Informal

Isu-isu terkait tata kelola pekerjaan platform online saat ini menjadi salah satu perhatian terpenting dalam pengembangan pasar tenaga kerja digital. Pekerjaan platform online, yang sering diklasifikasikan sebagai pekerjaan sambilan dan lepas, menciptakan batasan regulasi yang terkait dengan status pekerja yang sering kali ambigu - mulai dari pekerja mandiri hingga pekerja kontrak jangka pendek. Untuk mengatasi isu-isu ini, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa regulasi baru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 1 dan 3 Tahun 2025 tentang Program Asuransi Sosial bagi Pekerja yang memberikan pedoman pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 dan 3 Tahun 2025). Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan jaring pengaman sosial bagi pekerja yang menganggur, termasuk mereka yang bekerja di ekonomi informal dan digital.

Namun, fleksibilitas tinggi yang menjadi ciri pekerjaan melalui platform online menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar di pasar tenaga kerja, termasuk pendapatan, status pekerjaan, dan akses ke jaminan sosial. Ketidakpastian ini mendorong sebagian pekerja untuk beralih atau tetap bekerja di sektor ekonomi informal di mana jaminan pendapatan, tunjangan sosial, dan kepastian pekerjaan sangat tidak memadai, yang pada gilirannya memperburuk ekonomi bayangan. Selain itu, tata kelola pekerjaan platform online memerlukan kerangka hukum yang fleksibel dan komprehensif dalam menangani karakteristik pekerjaan yang khas, yaitu digital, fleksibel, terfragmentasi, dan sementara, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Regulasi yang tidak fleksibel dan tidak responsif terhadap perubahan dalam pasar digital dapat

memperburuk ketidakpastian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi bayangan. Singkatnya, perhatian utama dalam tata kelola pekerjaan platform online adalah bagaimana menyeimbangkan integrasi elastisitas dan perlindungan sosial yang dibutuhkan ekonomi digital dengan kepastian hukum bagi para pekerja. Pasar tenaga kerja yang tidak terstruktur akibat distribusi pekerjaan melalui platform online berpotensi meningkatkan pergeseran ke arah pekerjaan informal dan ekonomi bayangan, oleh karena itu kerangka regulasi yang inovatif dan responsif sangat penting.

## Penelitian Terdahulu

*Shadow economy* diartikan sebagai fenomena ekonomi yang mencakup segala bentuk aktivitas produksi, dan perdagangan barang dan jasa yang tidak di catat dalam statistik nasional serta tidak di masukkan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) resmi. Fenomena ini sudah cukup lama menjadi sorotan bagi para ekonom dan policy maker akibat dampaknya yang sangat signifikan terhadap perekonomian formal, penerimaan pajak, dan efisiensi kebijakan fiskal. Besarnya *shadow economy* dapat mengindikasikan tingginya aktivitas penghindaran pajak, ketidakpatuhan regulasi, serta lemahnya control pemerintah.

Berbagai studi empiris mencoba untuk mengukur dan menganalisis faktor yang mendorong perkembangan *shadow economy*, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Model yang umum digunakan adalah MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes), memadukan variabel-variabel penyebab dan indikator untuk secara tidak langsung memperkirakan ukuran ekonomi bayangan (Lukmana & Kartiasih, 2025). Selain itu, penelitian juga sebaliknya meneliti *shadow economy* berkaitan dengan pengangguran, kualitas administrasi publik, korupsi, inflasi, serta dampak digitalisasi terhadap ekonomi bayangan dan dinamika kondisi.

Berikut ini disajikan ringkasan beberapa studi terdahulu yang relevan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kajian empiris terkait *shadow economy* di Indonesia dan negara berkembang

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nchor (2021)          | Size of Govt, Tax Rates, Business Reg., Unemployment, GDP/capita, Admin. Quality berpengaruh positif terhadap <i>shadow economy</i>                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Schneider (2022)      | Tax burden, Labor regulation, Unemployment, GDP per capita berpengaruh positif terhadap <i>Shadow Economy</i> karena penganggur cenderung mencari penghasilan di sektor informal. Sedangkan Pertumbuhan <i>Shadow Economy</i> berpengaruh negatif terhadap indikator ekonomi resmi karena menurunkan akurasi data makro dan memperbesar distorsi statistik. |
| 3  | Remeikiene (2021)     | Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap : <i>Shadow economy</i> dan aktivitas informal selama pandemi. di wilayah Lithuania selama pandemi COVID-19.                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Tudose et al., (2016) | Ukuran Ekonomi Bayangan, Variasi di Uni Eropa, Konsentrasi Geografis menunjukkan <i>pengaruh positif</i> pada Ekonomi Bayangan<br>Tren 2009 menunjukkan berpengaruh negatif signifikan ekonomi bayangan, kecuali di Rumania.                                                                                                                                |
| 5  | Achim et al., (2019)  | Budaya dan religiositas berpengaruh positif terhadap ekonomi bayangan, sementara kebahagiaan, tata kelola yang baik, dan pembangunan ekonomi berpengaruh negatif.                                                                                                                                                                                           |

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Ginevicius et al., (2020)       | GDP/capita berpengaruh negatif signifikan terhadap shadow economy                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Abada et al., (2021)            | Tingkat pengangguran berpengaruh positif dengan ekonomi bayangan, di mana pengangguran mendorong partisipasi dalam kegiatan informal                                                                                                                                                           |
| 9  | Poufinas et al., (2021)         | Terdapat hubungan negatif antara indeks daya saing global, GDP per kapita, dan ekspor dengan ekonomi bayangan<br>Terdapat hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan ekonomi bayangan                                                                                                 |
| 10 | Tran, (2021)                    | Pengangguran, pengeluaran pemerintah, kredit bank, dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap ekonomi bayangan, sedangkan GDP per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap shadow economy.                                                                                      |
| 11 | Kravchenko et al., (2022)       | Korupsi dan inflasi berpengaruh positif terhadap shadow economy, sementara PDB dan Rule of Law, Investasi asing langsung (FDI) berpengaruh negatif terhadap shadow economy.                                                                                                                    |
| 12 | Lestari et al., (2022)          | Variabel Dependen: shadow economy, tax revenue<br>Variabel Independen: FDI, pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan<br>Shadow Economy berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak<br>Share of SMEs tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan |
| 13 | Remeikienė et al., (2022)       | ICT development dan human development berpengaruh signifikan dalam menurunkan ukuran shadow economy                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Yefimenko and Dobomenko, (2024) | Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik berpengaruh negatif terhadap shadow economy tingkat korupsi, sementara tingginya Shadow Economy berpengaruh positif terhadap peningkatan korupsi di negara-negara Eropa.                                                              |
| 16 | Buszko (2022)                   | Faktor pajak, pengangguran, dan standar hidup berpengaruh positif terhadap shadow economy.                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Zhanabekov (2022)               | GDP Growth Rate, Trade Openness, dan Kualitas Institusional berpengaruh negatif pada ukuran ekonomi bayangan, sedangkan Tingkat Pengangguran yang tinggi, Regulasi yang rumit, dan Ukuran Pemerintah yang besar berpengaruh positif pada ekonomi bayangan                                      |
| 18 | Azwar & Mulyawan (2017)         | Aktivitas underground economy berpengaruh positif terhadap hilangnya potensi penerimaan pajak negara, dengan tarif pajak yang tinggi berpengaruh positif terhadap peningkatan underground economy,                                                                                             |
| 19 | Azhar and Sohieben, (2021)      | JUB & beban pajak tinggi tingkatan shadow economy. PDB digunakan sebagai pembanding. Tax Amnesty pengaruhi hasil.                                                                                                                                                                              |
| 20 | Kristianto, (2021)              | Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindak korupsi dan tarif pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah uang beredar (M1), yang mencerminkan aktivitas underground economy                                                                                         |
| 21 | Rezky (2021)                    | beban pajak yang tinggi, regulasi yang ketat, tingkat pengangguran formal, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingginya tingkat korupsi berpengaruh positif terhadap Shadow economy                                                                                                |

## Pengembangan Hipotesis

Indikator ekonomi pengangguran menunjukkan proporsi angkatan kerja aktif suatu perekonomian yang tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja formal dan menjadi justifikasi utama atas peningkatan partisipasi kegiatan ekonomi dalam ekonomi informal atau ekonomi bayangan (Nchor, 2021). Orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi dalam kelompok ini terdorong untuk mencari pendapatan non upah yang tidak terdaftar melalui wirausaha informal atau pekerjaan di sektor informal. Secara teori, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula potensi peluang dan insentif bagi ekonomi bayangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Nchor (2021), Schneider (2022), Remeikienė et al., (2022), Abada et al., (2021), Poufinas et al., (2021), Tran (2021) dan Zhanabekov, (2022) menyatakan bahwa pengangguran memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan Shadow

Economy di negara-negara Eropa Timur. Penelitian berfokus pada studi lintas negara berkembang, bahwa pengangguran yang tinggi berpengaruh positif terhadap shadow economy dengan memicu peningkatan aktivitas informal karena dorongan ekonomi subsisten.

Peneliti berpendapat bahwa pengangguran menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong seseorang untuk mencari sumber pendapatan alternatif di luar sektor formal. Karena terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja formal dan beban regulasi yang berat, banyak orang memilih sektor informal yang tidak terdaftar yang lebih fleksibel. Dengan demikian, peningkatan pengangguran secara langsung akan menyebabkan perluasan ekonomi bayangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

**H1:** *Unemployment* berpengaruh positif terhadap *Shadow Economy*.

PDB per kapita sering digunakan sebagai indeks kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Secara umum, suatu negara dianggap memiliki sistem

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hukum, infrastruktur perpajakan, dan kontrol kelembagaan yang lebih baik jika memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi (Poufinas et al., 2021). Semua ini mengurangi insentif bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi secara informal atau dalam ekonomi bayangan karena daya beli yang meningkat dan peningkatan efektivitas pengawasan fiskal. Oleh karena itu, secara umum diasumsikan bahwa ada hubungan terbalik antara kenaikan PDB per kapita dan ukuran ekonomi bayangan.

Ginevicius et al., (2020), Nchor (2021), Poufinas et al., (2021) dan Tran, (2021), menyatakan bahwa GDP per kapita yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi negatif terhadap ukuran shadow economy karena meningkatnya daya beli masyarakat dan efektivitas pengawasan fiskal. Namun, Schneider (2022) dan Zhanabekov (2022) menyatakan bahwa GDP per kapita secara signifikan berkorelasi positif terhadap ukuran shadow economy. Beberapa literatur menunjukkan ambiguitas tergantung pada konteks negara, di mana pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dapat tetap memelihara sektor informal.

Peneliti berpendapat bahwa peningkatan PDB per kapita mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi formal, sehingga mengurangi insentif bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi secara informal. Namun demikian, jika terjadi ketimpangan dalam distribusi pertumbuhan ekonomi, dikombinasikan dengan lembaga pengawasan yang lemah, ekonomi bayangan akan tetap berkembang, terlepas dari peningkatan PDB per kapita. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H2:** GDP berpengaruh negatif terhadap Shadow Economy.

Inflasi yang tinggi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan harga barang serta jasa. Kondisi ini mendorong pelaku usaha dan konsumen untuk mencari jalur alternatif yang lebih efisien, salah satunya melalui pasar informal atau shadow economy (Kravchenko et al., 2022). Inflasi mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan peningkatan biaya transaksi di sektor formal, sehingga mendorong pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor informal yang lebih fleksibel dan kurang diatur (Tran, 2021). Dengan demikian, secara teori, inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan shadow economy.

Tran (2021) menemukan bahwa inflasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan shadow economy, khususnya di negara berkembang dengan sistem kontrol harga dan pendapatan yang lemah. (Kravchenko et al., 2022) juga mengonfirmasi bahwa inflasi berkorelasi positif dengan terhadap shadow economy tekanan inflasi mendorong pengalihan transaksi ke sektor informal demi efisiensi biaya.

Peneliti berargumen bahwa inflasi yang tinggi menciptakan tekanan ekonomi yang mengurangi daya beli dan stabilitas harga, sehingga pelaku ekonomi mencari alternatif di sektor informal yang lebih murah dan mudah diakses. Kondisi ini memperbesar ruang bagi shadow economy yang pada akhirnya mengurangi

efektivitas penerimaan pajak dan stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

**H3:** Inflasi berpengaruh positif terhadap Shadow Economy.

Ekspor mencerminkan integrasi suatu negara ke dalam ekonomi dunia. Semakin besar partisipasi ekspor, semakin tinggi pula permintaan akan transparansi, kepatuhan global, dan standarisasi regulasi. Secara tidak langsung hal ini membatasi ekonomi bayangan karena mereka yang ingin bersaing di pasar internasional diharuskan mematuhi bea cukai formal, termasuk perpajakan, dan regulasi perdagangan (Poufinas et al., 2021). Dalam konteks ini, ekspor diharapkan dapat mendorong para pengusaha untuk mematuhi pendaftaran bisnis formal, sehingga mengurangi tingkat aktivitas ekonomi bayangan.

Poufinas et al., (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekspor memiliki pengaruh negatif terhadap shadow economy karena mendorong pelaku usaha untuk mematuhi sistem formal agar dapat bersaing di pasar internasional.

Peneliti berargumen bahwa keterlibatan dalam perdagangan internasional menuntut pelaku usaha untuk memenuhi standar dan regulasi yang ketat, sehingga mengurangi insentif untuk beroperasi secara informal. Dengan meningkatnya ekspor, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan shadow economy. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

**H4:** Ekspor berpengaruh negatif terhadap Shadow Economy.

Korupsi merupakan salah satu faktor yang secara teoritis dan empiris diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap shadow economy. Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, semakin besar kecenderungan pelaku ekonomi untuk beroperasi di luar sistem formal dan menghindari kewajiban pajak serta regulasi resmi (Rezky, 2021). Hal ini terjadi karena korupsi melemahkan efektivitas pengawasan pemerintah dan menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan birokrasi, sehingga mendorong aktivitas ekonomi bayangan sebagai bentuk respons terhadap ketidakpastian dan biaya tinggi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi (Lestari et al., 2022).

Penelitian (Kristianto, 2021) serta Yefimenko and Dobomenko, (2024) menemukan bahwa korupsi memiliki pengaruh signifikan dalam memperbesar ukuran shadow economy, terutama di negara dengan sistem hukum yang lemah.

Peneliti berargumen bahwa korupsi menciptakan biaya tambahan dan ketidakpastian dalam menjalankan usaha secara formal, sehingga pelaku usaha memilih untuk beroperasi secara informal atau dalam shadow economy guna menghindari beban tersebut. Korupsi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem perpajakan, yang pada gilirannya menurunkan kepatuhan fiskal dan memperbesar ruang bagi aktivitas ekonomi bayangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**H5:** Korupsi berpengaruh positif terhadap Shadow Economy.

Fragmentasi pekerjaan platform online mengacu pada disintegrasi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil, sementara, dan kontraktual yang dilakukan pada platform digital. Secara teori, semakin tinggi tingkat fragmentasi pekerjaan platform online, semakin besar kemungkinan bahwa aktivitas ekonomi tersebut ‘tersembunyi’ dan sulit diawasi oleh pemerintah. Hal ini karena sifat pekerjaan yang fleksibel, tidak terikat dengan kontrak jangka panjang, dan sering kali tidak memiliki perlindungan sosial atau kewajiban pajak yang jelas. Oleh karena itu, ada kemungkinan kuat bahwa fragmentasi pekerjaan platform online mendorong pertumbuhan ekonomi bayangan karena pekerja dan pengusaha di platform digital cenderung menghindari formalitas dan kewajiban pajak.

*Online work fragmentation* (OWF) atau biasa disebut Fragmentasi Pekerjaan Platform online merupakan variabel baru yang dibuat untuk mengevaluasi tingkat kompleksitas dan fragmentasi sistem ketenagakerjaan dalam konteks ekonomi yang didukung secara digital. Dalam lingkup ekonomi digital modern, munculnya pekerjaan berbasis aplikasi seperti transportasi daring, pengiriman makanan, pekerja lepas digital, dan aktivitas ekonomi pertunjukan lainnya menimbulkan masalah baru terkait regulasi, pengumpulan data, dan administrasi pajak. Remeikiené et al., (2022) menyatakan bahwa ekonomi digital dan perluasan ekonomi pertunjukan cenderung meningkatkan ukuran ekonomi bayangan, yang dicirikan oleh pengaturan kerja yang tidak terstandarisasi dan diatur secara longgar. Semakin tinggi indeks fragmentasi pekerjaan yang dilakukan di suatu platform, semakin besar kemungkinan bahwa kegiatan ekonomi tersebut tidak akan tercatat dan dianggap sebagai bagian dari ekonomi informal.

Peneliti berpendapat bahwa fragmentasi pekerjaan platform online berkontribusi pada terciptanya pasar tenaga kerja yang longgar dan tidak terstruktur, yang mengarah pada penghindaran formalitas dan kewajiban pajak oleh pekerja dan pengusaha di sektor ini. Ketidakjelasan pendapatan yang dikombinasikan dengan perlindungan sosial yang lemah memotivasi mereka untuk berfungsi di luar sistem formal, sehingga memperluas ekonomi bayangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

**H6:** *Online Work Fragmentation* pengaruh positif terhadap Shadow Economy

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada negara-negara di seluruh dunia yang memenuhi kriteria ketersediaan data yang lengkap dan konsisten untuk periode 2013 hingga 2023. Pemilihan negara dilakukan secara purposif berdasarkan kelengkapan data makroekonomi, institusional, dan indikator digital yang dibutuhkan dalam analisis model. Dengan demikian, cakupan geografis bersifat global, namun selektif berdasarkan validitas dan keterbandingan data antarnegara. Pemilihan batas waktu hingga tahun 2023

didasarkan pada ketersediaan data resmi dan valid dari berbagai sumber internasional dan nasional, mengingat laporan dan data tahun 2024 belum sepenuhnya tersedia atau dipublikasikan saat penelitian ini dilakukan. Fokus global dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai dampak transformasi ekonomi digital terhadap ekspansi ekonomi bayangan di berbagai konteks institusional dan sosial-ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis variasi struktural dan regional dalam kemunculan shadow economy yang dipicu oleh pertumbuhan pekerjaan platform online di negara-negara dengan tingkat digitalisasi dan kapasitas kelembagaan yang beragam. Data panel yang digunakan mencakup periode 2013 hingga 2023, memungkinkan analisis perubahan struktural jangka panjang dan respons terhadap dinamika ekonomi global.

### Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel dari sejumlah negara di seluruh dunia yang memenuhi kriteria ketersediaan dan kelengkapan data selama periode 2013 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, terutama terkait ketersediaan data makroekonomi, institusional, dan indikator digital yang dibutuhkan dalam analisis. Negara-negara yang tidak memiliki data lengkap selama sebagian besar tahun dalam rentang waktu tersebut dikeluarkan dari sampel untuk menjaga konsistensi dan validitas analisis. Dengan pendekatan ini, jumlah sampel penelitian observasi adalah 934 data, tergantung pada jumlah negara yang memenuhi syarat dan cakupan tahunan masing-masing variabel.

Batas waktu pengamatan ditetapkan hingga tahun 2023 karena data tahun 2024 belum tersedia secara lengkap pada saat penelitian ini dilakukan. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel dan telah diakui secara luas dalam studi lintas negara. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain World Bank (melalui World Development Indicators dan Worldwide Governance Indicators), International Labour Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF), Transparency International, OECD, Statista, serta lembaga digital seperti International Telecommunication Union (ITU) dan Google Mobility Reports. Selain itu, data sosial dan nilai-nilai publik diperoleh dari survei global seperti World Values Survey dan European Social Survey yang menyediakan indikator moral pajak dan tingkat kepercayaan sosial.

Jenis data yang digunakan meliputi data kuantitatif berupa data kontinu dan diskrit. Data kontinu mencakup variabel seperti tingkat pengangguran, PDB per kapita, inflasi, dan ekspor, sedangkan data diskrit mencakup indikator-indikator institusional seperti indeks kontrol korupsi dan kualitas administrasi publik. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi dan publikasi internasional, seperti World Bank, Transparency International, serta studi dan jurnal ilmiah terkait shadow economy di negara di seluruh dunia. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sekunder, diperoleh dari publikasi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, untuk data lintas negara. Penggunaan beberapa indikator komposit seperti indeks efektivitas pemerintahan dan indeks fragmentasi pekerjaan platform online bertujuan untuk menangkap aspek kualitatif yang mempengaruhi dinamika sektor informal secara lebih menyeluruh dan multidimensi.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengakses database resmi dan publikasi yang valid dan terpercaya. Peneliti melakukan verifikasi data dengan membandingkan beberapa sumber untuk

memastikan konsistensi dan akurasi data. Selain itu, data yang diperoleh melalui studi terdahulu juga dikaji ulang untuk memastikan relevansi dengan konteks penelitian saat ini.

Untuk menjamin reliabilitas data, peneliti menggunakan data dari sumber yang telah diakui kredibilitasnya secara internasional dan menggunakan metode pengumpulan data yang sistematis. Validitas data dijaga dengan memilih variabel dan indikator yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu dan memiliki standar pengukuran yang jelas.

**Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Sumber Data**

| Variabel                         | Sym | Sumber Data / Institusi                                   |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| <i>Shadow Economy</i>            | Y   | <i>World Economic Outlook Database</i> , IMF              |
| <i>Unemployment</i>              | X1  | <i>World Development Indicators (WDI)</i> , World Bank    |
| <i>GDP</i>                       | X2  | <i>World Development Indicators (WDI)</i> , World Bank    |
| <i>Inflation</i>                 | X3  | <i>World Development Indicators (WDI)</i> , World Bank    |
| <i>Export</i>                    | X4  | <i>World Development Indicators (WDI)</i> , World Bank    |
| <i>Corruption</i>                | X5  | <i>Worldwide Governance Indicators (WGI)</i> , World Bank |
| <i>Online Work Fragmentation</i> | X6  | <i>ILOSTAT Database</i>                                   |

## Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini perlu diberikan definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *shadow economy* yang merepresentasikan ekonomi bayangan yang tidak tercatat secara resmi dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Sedangkan variabel independen terdiri dari beberapa faktor yang diduga memengaruhi besaran ekonomi bayangan tersebut, yaitu *Online Work Fragmentation*, yang mengukur fragmentasi pekerjaan berbasis platform digital; Tingkat Pengangguran sebagai persentase

tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan; Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan ekonomi; Kualitas Administrasi Publik, yang mencakup efektivitas birokrasi dan transparansi pengelolaan pemerintah; Inflasi sebagai tingkat perubahan harga barang dan jasa; Ekspor sebagai proporsi nilai barang dan jasa yang dijual ke luar negeri; serta Korupsi, yang diukur melalui indeks persepsi korupsi dan kontrol korupsi sebagai cerminan tingkat integritas dan pengendalian korupsi di suatu negara. Berikut penjelasan lengkap dan definisi operasional variabel beserta rumus masing masing variabel tersebut.

**Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

| Variabel                  | Indikator                                                                                                                              | Definisi Operasional / Formula                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependen</b>           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| Shadow Economy            | 1. Labor Force Participation Rate (LFPR)<br>2. Pertumbuhan GDP per kapita<br>3. Uang Tunai di luar sistem perbankan (% terhadap GDP)   | $\text{Shadow Economy} = \lambda_1(\text{LFPR}) + \lambda_2(\text{GDP Growth}) + \lambda_3(\text{Cash Outside Banks / GDP}) + \varepsilon$ |
| <b>Independen</b>         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| Unemployment              | Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja                                                                                        | $\text{Unemployment Rate} = (\text{Total Penganggur} / \text{Total Angkatan Kerja}) \times 100$                                            |
| GDP                       | GDP per kapita dalam USD                                                                                                               | $\text{GDP} = \text{Nominal GDP} / \text{Total Penduduk}$                                                                                  |
| Inflasi                   | Persentase perubahan tahunan pada Indeks Harga Konsumen (CPI)                                                                          | $\text{Inflation Rate (\%)} = [(CPI_t - CPI_{t-1}) / CPI_{t-1}] \times 100\%$                                                              |
| Ekspor                    | Nilai ekspor barang dan jasa dalam USD                                                                                                 | $\text{Export Ratio} = (\text{Nilai Ekspor} / \text{GDP}) \times 100$                                                                      |
| Corruption Control        | persepsi tingkat korupsi di sektor publik suatu negara.<br>Corruption Perceptions Index (0–100) 0 = sangat korup, 100 = sangat bersih. | $\text{Corruption Perceptions Index (CPI)} = (\text{jumlah skor survei standar} / \text{jumlah sumberdata})$                               |
| Online Work Fragmentation | Persentase pekerja yang memperoleh penghasilan utama dari platform digital OLI (Online Labor Indicator)                                | $\text{OLI (Online Labor Indicator)} = (\text{jumlah project online di platform online} / \text{periode waktu})$                           |

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pemilihan model penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu relevansi teoritis, kelayakan empiris, dan fleksibilitas analisis. Dari sisi relevansi teoritis, model ini selaras dengan teori Shadow Economy yang menyatakan bahwa faktor-faktor makroekonomi serta tata kelola pemerintahan memengaruhi besarnya ukuran ekonomi bayangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Model ini dirancang untuk menganalisis data lintas negara (*cross-country*) dengan karakteristik yang heterogen sehingga mampu menjelaskan variasi shadow economy secara lebih komprehensif dan mendalam. Pendekatan regresi linear berganda dipilih karena mampu menguji hipotesis secara simultan maupun parsial. Model ini diperluas dengan penggunaan uji *robust standard error* untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas yang sering muncul pada data lintas negara, sehingga hasil analisis menjadi lebih reliabel dan valid. Spesifikasi model dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

dengan:

- $Y$  = Shadow Economy
- $\beta$  = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- $X_1 - X_6$  = Variabel independen sebagaimana dijelaskan sebelumnya
- $\varepsilon$  = error term

Selanjutnya, untuk mengkaji implikasi shadow economy terhadap *tax avoidance*, dibentuk model lanjutan:

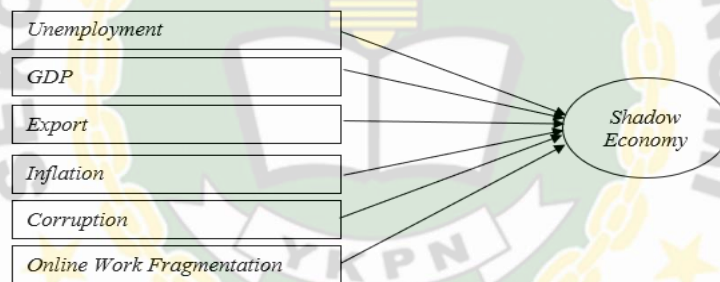
$$TA = \alpha + \beta Y + \varepsilon$$

dimana:

- $TA$  = Tax Avoidance
- $Y$  = Shadow Economy
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien pengaruh Shadow Economy terhadap Tax Avoidance

Jika kedua model tersebut digabungkan (substitusi), maka model akhir menjadi:

$$TA = \alpha + \beta(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6) + \varepsilon$$



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Theoritis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik distribusi data dalam penelitian. Analisis ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), simpangan baku (*standard deviation*), keruncingan (*excess kurtosis*), kemiringan distribusi (*skewness*), serta jumlah observasi yang digunakan. Data ini memberikan informasi dasar untuk memahami pola distribusi dan potensi masalah dalam analisis lanjutan, seperti adanya outlier atau distribusi yang tidak normal.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel                     | N   | Minimum  | Maximum     | Mean       | Std. Deviation |
|------------------------------|-----|----------|-------------|------------|----------------|
| Y.Shadow_Economy             | 934 | 72,2400  | 575,7800    | 181,2636   | 61,3129        |
| X1.Unemployement             | 934 | 0,2400   | 52,0600     | 13,8254    | 9,4634         |
| X2.GDP                       | 934 | 192,0700 | 134965,8200 | 19806,6092 | 23797,4337     |
| X3.Inflation                 | 934 | -3,2300  | 221,3400    | 5,4558     | 12,2158        |
| X4.Export                    | 934 | 4,5500   | 222,3100    | 45,1808    | 33,6447        |
| X5.Corruption Control        | 934 | 16,0000  | 90,0000     | 48,2891    | 18,7697        |
| X6.Online_Work_Fragmentation | 934 | 0,0001   | 9,8657      | 0,7169     | 2,0901         |

Statistik deskriptif adalah memberikan gambaran umum terkait data dalam penelitian seperti nilai minimum, maksimum, mean, penyebaran data (*standard deviation*, *variance*). Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan 934 observasi ( $N = 934$ ) dari berbagai negara, sehingga peneliti perlu memperhatikan bagaimana distribusi data untuk setiap variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel *shadow economy* memiliki nilai minimum sebesar 72,24 dan maksimum 575,78 dengan rata-rata 181,26 serta simpangan baku sebesar 61,31. Nilai rata-rata yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan bahwa sektor ekonomi bayangan secara umum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara dalam sampel. Rentang nilai yang lebar antara minimum dan maksimum (selisih 503,54) menunjukkan adanya disparitas yang sangat besar terkait proporsi aktivitas ekonomi bayangan antarnegara dalam periode penelitian.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa *shadow economy* memiliki nilai minimum 72,24, maksimum 575,78, rerata 181,26, dan deviasi standar 61,31. Rata-rata yang relatif tinggi menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, ekonomi bayangan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara-negara sampel. Rentang yang lebar antara nilai minimum dan maksimum (selisih 503,54) menunjukkan adanya disparitas yang sangat besar dalam proporsi kegiatan ekonomi bayangan antarnegara selama periode studi.

Tingkat pengangguran (*unemployment*), nilai minimum yang tercatat adalah 0,24 persen dan maksimum 52,06 persen, dengan rerata 13,83 persen dan deviasi standar 9,46. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara dalam sampel berada pada tingkat pengangguran yang relatif moderat, meskipun beberapa negara memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah dan sangat tinggi. Perbedaan ini mencerminkan disparitas kondisi pasar tenaga kerja di berbagai negara.

PDB menunjukkan rentang nilai yang sangat luas, dengan nilai minimum 192,07 juta dolar AS dan maksimum 134.965,82 juta dolar AS, menghasilkan rata-rata 19.806,61 juta dolar AS dengan deviasi standar 23.797,43 juta dolar AS. Angka-angka ini mencerminkan disparitas yang signifikan dalam perekonomian negara-negara yang dianalisis, di mana sebagian besar negara berkembang memiliki PDB yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju.

Inflasi, nilai minimumnya adalah -3,23% (deflasi) dan nilai maksimumnya adalah 221,34% dengan rata-rata 5,46% dan deviasi standar 12,21. Secara keseluruhan, nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar negara dalam sampel mempertahankan tingkat inflasi yang terkendali, meskipun beberapa negara mengalami hiperinflasi selama periode penelitian, sebagaimana dibuktikan oleh nilai maksimum yang sangat tinggi.

Ekspor memiliki nilai minimum 4,55% dan nilai maksimum 222,31% dengan nilai rata-rata 45,18% dan deviasi standar 33,64. Nilai tersebut menunjukkan tingkat variasi yang wajar antar negara terkait dengan tingkat perdagangan internasional, dengan negara yang memiliki perekonomian relatif terbuka menunjukkan rasio ekspor terhadap PDB yang tinggi.

Variabel indeks penanganan korupsi (*corruption control*) menunjukkan nilai minimum 16 dan maksimum 90 dengan rata-rata 48,29 dan deviasi standar 18,77. Rata-rata sampel yang berada di kisaran tengah menunjukkan bahwa negara-negara dalam sampel memiliki perbedaan yang relatif kuat dalam hal tingkat korupsi, yang menunjukkan perbedaan tata kelola dan sistem hukum yang berlaku.

Fragmentasi pekerjaan berbasis platform online atau *online work fragmentation* memiliki nilai minimum 0,0001 dan maksimum 9,8657 dengan rata-rata 0,7169 serta deviasi standar 2,09. Adanya rata-rata yang relatif rendah menunjukkan bahwa penetrasi model kerja berbasis platform dare masih terbatas di sebagian besar negara, meskipun ada negara lain yang memiliki tingkat adopsi dan fragmentasi pekerjaan dare yang tinggi.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memvalidasi kesesuaian model regresi dengan asumsi dasar statistik. Jika asumsi-asumsi ini terpenuhi, hasil estimasi dianggap dapat diinterpretasikan secara akurat tanpa bias. Dalam lingkup penelitian lintas negara (*cross-country data*), asumsi klasik yang diuji adalah normalitas residual, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan komponen penting dalam analisis karena regresi linier mengasumsikan residual (selisih antara nilai observasi dan prediksi) terdistribusi normal. Residu yang terdistribusi secara normatif memungkinkan model regresi untuk mengestimasi koefisien yang tidak bias, efisien, dan konsisten. Untuk penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang merupakan salah satu bentuk statistik non-parametrik yang dapat menunjukkan adanya distribusi data yang tidak merata di antara kelompok-kelompok. Data lintas negara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat heterogen, dengan faktor ekonomi, sosial, dan regulasi yang sangat bervariasi. Dengan demikian, uji ini dianggap tepat untuk menilai apakah distribusi variabel yang diteliti seragam di antara kelompok-kelompok. Kriteria Pengambilan Keputusan Untuk tujuan Asimilasi Sig. Kriteria (nilai-p) dalam uji Kruskal-Wallis, memenuhi kondisi berikut: Nilai-p > 0,05 menunjukkan bahwa data dianggap Normal. Ini menyiratkan adanya distribusi data yang seragam di seluruh kelompok dan tidak terdapat disparitas distribusi yang signifikan. Nilai-p ≤ 0,05 menunjukkan bahwa data dianggap Tidak Normal. Ini menyiratkan adanya disparitas distribusi yang signifikan di seluruh kelompok, yang menunjukkan distribusi non-normal.

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistit Kruskal-Wallis (Normalitas Data)

| Variabel                      | Chi-Square | Asymp. Sig. (p-value) | Keterangan   |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| X1. Unemployment              | 7,064      | 0,0078                | Tidak normal |
| X2. GDP                       | 447,495    | 2,5308                | Normal       |
| X3. Inflation                 | 55,426     | 9,7059                | Normal       |
| X4. Export                    | 34,853     | 3,5554                | Normal       |
| X5. Corruption Control        | 427,603    | 5,4027                | Normal       |
| X6. Online Work Fragmentation | 71,642     | 2,5800                | Normal       |

Tabel 4.2 Hasil menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini (X1-X6) memiliki nilai  $p \leq 0,05$ , yang berarti tidak ada variabel yang terdistribusi normal. Berikut penjelasan lebih rinci:

Variabel *unemployment* atau pengangguran (X1), nilai Asymp. Sig. adalah 0,0078, yang lebih rendah dari (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data variabel pengangguran tidak terdistribusi normal. Ketidaknormalan ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat pengangguran antarnegara yang cukup besar. Ada negara dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah ( $< 1\%$ ) dan negara dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi ( $> 40\%$ ). Perbedaan yang mencolok ini menyebabkan distribusi data menjadi miring, alih-alih seragam.

variabel GDP (X2), Asymp. Sig. adalah 2,5308, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data PDB terdistribusi normal. Meskipun terdapat variasi ukuran perekonomian antarnegara yang termasuk dalam sampel, perbedaan tersebut secara statistik tidak cukup besar untuk menyebabkan kemiringan yang signifikan dalam distribusi. Normalitas distribusi PDB menunjukkan bahwa data tersebar relatif merata di antara kelompok negara yang dianalisis.

Variabel Inflasi (X3), Asymp. tanda tangan. nilainya adalah 9,7059, lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, sebaran data inflasi dapat dikatakan normal. Hal ini cukup menarik karena inflasi mempunyai rentang nilai yang luas, antara inflasi negatif dan inflasi yang sangat tinggi. Meski demikian, penyebaran data inflasi antar negara yang relatif merata mendukung normalitas sebaran variabel tersebut.

Variabel Ekspor (X4) Skor Asymp. tanda tangan. diberikan 3,5554, lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, distribusi data ekspor adalah normal. Di dalam data, perbedaan ekspor antarnegara terlihat tidak cukup besar dan tidak signifikan secara statistik sehingga mempengaruhi distribusi data. Hal ini menunjukkan bahwa data ekspor memiliki sebaran yang merata di seluruh kelompok negara.

Corruption control (X5) menunjukkan nilai Asymp. 5,4027, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data Corruption control terdistribusi normal. Dapat disimpulkan, tingkat distribusi persepsi korupsi antarnegara yang bervariasi tidak mengakibatkan distribusi data menyimpang dari normalitas. Pendistribusian yang merata menunjukkan bahwa dapat dianalisis menggunakan pendekatan parametrik dari parametrik dengan lebih tinggi.

Fragmentasi Pekerjaan Online (X6) Asymp. tanda tangan. menunjukkan nilai 2,5800, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi

data fragmentasi pekerjaan berbasis platform berani berdistribusi normal. Variasi antarnegara tidak cukup besar untuk mempengaruhi distribusi data secara keseluruhan. Mempertahankan normalitas data pada variabel ini menguntungkan integrasi dalam analisis regresi yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya variabel Pengangguran (X1) yang tidak memenuhi asumsi normalitas, sedangkan lima variabel lainnya (PDB, Inflasi, Ekspor, Corruption control, dan Fragmentasi Pekerjaan Online) memiliki distribusi data yang normal. Ketidaknormalan pada satu variabel ini tidak menjadi masalah karena sampel yang digunakan sangat besar ( $n = 934$ ) sehingga model regresi linier berganda tetap valid digunakan berdasarkan Teorema Limit Pusat. Untuk menjaga validitas hasil, kami tetap melengkapi analisis dengan pendekatan non-parametrik seperti uji jangkauan Kruskal-Wallis untuk variabel yang tidak berdistribusi normal.

## Uji Kruskal-Wallis Mean Rank (Peringkat Rata-Rata)

Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah dua kelompok atau lebih berbeda secara signifikan dalam distribusi skor mereka. Uji ini bermanfaat dalam kasus di mana data tidak memenuhi asumsi normalitas atau homogenitas varians yang dipersyaratkan dalam uji parametrik seperti ANOVA satu arah. Tidak seperti ANOVA, Kruskal-Wallis tidak bekerja dengan skor mentah; melainkan, ia memeringkat data dan kemudian menghitung peringkat rata-rata (Mean Rank) untuk setiap kelompok yang akan digunakan dalam analisis.

Dalam konteks ini, Mean Rank berfungsi untuk mencerminkan posisi rata-rata data di setiap kelompok. Nilai Mean Rank yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kelompok tersebut lebih mungkin memiliki nilai variabel yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Sebaliknya, Mean Rank yang lebih rendah menunjukkan bahwa kelompok tersebut lebih mungkin memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah. Dengan demikian, Mean Rank memudahkan untuk mendeteksi kelompok mana yang cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain.

Dalam hal ini, kelompok didefinisikan sebagai negara maju dan negara berkembang (pengelompokan variabel: Jenis). Peringkat Rata-rata yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis diterapkan untuk menentukan kelompok mana yang lebih mungkin memiliki nilai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

variabel yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan Mean Rank berguna untuk memahami perbedaan karakteristik perilaku sosial-ekonomi dan faktor

struktural yang mendasari yang mencirikan kedua kelompok negara. Hasil lengkap Mean Rank untuk setiap variabel disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.3 Ranks (Mean Rank) Tiap Variabel**

| Variabel                      | Jenis             | N   | Mean Rank |
|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| X1. Unemployment              | Negara Maju       | 208 | 423,67    |
|                               | Negara Berkembang | 726 | 480,06    |
| X2. GDP                       | Negara Maju       | 208 | 816,36    |
|                               | Negara Berkembang | 726 | 367,55    |
| X3. Inflation                 | Negara Maju       | 208 | 344,73    |
|                               | Negara Berkembang | 726 | 502,67    |
| X4. Export                    | Negara Maju       | 208 | 564,86    |
|                               | Negara Berkembang | 726 | 439,61    |
| X5. Corruption Control        | Negara Maju       | 208 | 808,44    |
|                               | Negara Berkembang | 726 | 369,82    |
| X6. Online Work Fragmentation | Negara Maju       | 208 | 607,02    |
|                               | Negara Berkembang | 726 | 427,53    |

Hasil Mean Rank pada Tabel 4.7 menunjukkan adanya pola yang bersesuaian antara negara maju dan negara berkembang pada sebagian besar variabel. Negara maju unggul dalam variabel yang mengukur kekuatan dan stabilitas ekonomi seperti PDB, ekspor, indeks korupsi yang lebih rendah (lebih bersih), dan tingkat fragmentasi pekerjaan digital yang lebih tinggi. Di sisi lain, negara berkembang unggul dalam mengukur ketidakstabilan makroekonomi melalui tingkat pengangguran dan inflasi yang lebih tinggi.

Pada variabel X1. *Unemployment* atau Tingkat Pengangguran, negara berkembang unggul dengan Mean Rank yang lebih tinggi, yaitu 480,06, dibandingkan dengan negara maju dengan 423,67. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengangguran di negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Kesenjangan ini mungkin disebabkan oleh tantangan struktural di pasar tenaga kerja di negara berkembang, meliputi terbatasnya kesempatan kerja formal, tingkat keterampilan dan pendidikan dasar tenaga kerja, serta tingginya ketergantungan pada pekerjaan informal, yang lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Variabel X2. PDB (*Produk Domestik Bruto*), negara maju memiliki Peringkat Rata-rata yang jauh lebih tinggi, yaitu 816,36, sementara negara berkembang berada di angka 367,55. Hal ini menunjukkan bahwa PDB negara maju secara konsisten lebih tinggi daripada PDB negara berkembang. Kesenjangan ini dapat dipahami mengingat negara maju memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, infrastruktur yang lebih baik, teknologi yang lebih maju, dan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi. Faktor-faktor ini memungkinkan negara maju menghasilkan output yang lebih besar dan kompetitif di pasar global.

Variabel X3. *Inflation* atau Inflasi, tercatat bahwa negara berkembang memiliki Peringkat Rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 502,67, dibandingkan dengan 344,73 di negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di negara berkembang lebih tinggi dan lebih fluktuatif. Biasanya, negara maju memiliki kebijakan moneter yang lebih stabil, pasar keuangan yang lebih dalam, dan mekanisme pengendalian harga

yang lebih efektif, yang menghasilkan inflasi yang lebih stabil. Di sisi lain, negara berkembang lebih rentan terhadap inflasi tinggi karena ketergantungan pada bahan baku impor, nilai tukar yang fluktuatif, dan kapasitas produksi domestik yang terbatas.

Pada variabel X4. *Export* (Ekspor), negara-negara maju memiliki Mean Rank yang jauh lebih tinggi dengan 564,86, sementara negara-negara berkembang hanya 439,61. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor negara maju memang jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang. Perbedaan ini mencerminkan kemampuan industri negara maju yang lebih maju dan mapan, teknologi yang lebih maju, serta jaringan perdagangan internasional yang lebih luas. Produk negara maju umumnya lebih menguasai pasar dibandingkan negara berkembang.

Variabel X5. *Corruption* (Korupsi), terlihat bahwa negara-negara maju memiliki Mean Rank yang lebih tinggi dengan 808,44, sementara negara-negara berkembang hanya 369,82. Mengingat indeks korupsi pada umumnya diukur dengan skala yang lebih tinggi menunjukkan tata kelola yang lebih baik (lebih sedikit korupsi), hasil ini menunjukkan negara maju memiliki pemerintahan yang lebih baik. Sebaliknya, negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan lapangan korupsi yang sangat berdampak terhadap sistem pemerintahan yang lebih efisien, investasi, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Pada Variabel X6. *Online Work Fragmentation* (Fragmentasi Kerja Online), negara maju memiliki Mean Rank 607,02, sementara negara berkembang berada di peringkat lebih rendah, yaitu 427,53. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi kerja berbasis online atau platform lebih maju dan lebih terstruktur di negara maju. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan teknologi digital, akses internet, dan regulasi platform ketenagakerjaan yang jauh lebih tinggi di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang.

Perbedaan nilai Mean Rank yang mencolok juga menjadi alasan utama mengapa hasil Uji Kruskal Wallis, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya, menghasilkan nilai  $p \leq 0,05$  untuk semua variabel. Hal

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi antara kelompok ekonomi maju dan ekonomi berkembang untuk semua variabel penelitian. Perbedaan tersebut, dalam konteks kerangka kerja negara berkembang yang maju, harus ditangani secara kausal selama interpretasi hasil analisis lebih lanjut karena dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antar variabel yang diuji.

## Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah bagian dari asumsi klasik yang memiliki peranan penting pada regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui korelasi linear yang sufficient antar variabel independen pada model yang telah dibentuk. Jika terjadi multikolinearitas, hal tersebut berpotensi untuk menurunkan kualitas dan stabilitas dari model regresi. Masalah yang paling umum terjadi adalah ketidakstabilan pada nilai koefisien regresi, yang mana parameter ini dapat berfluktuasi secara drastis ketika model yang dibangun ditambah atau dikurangi dengan variabel independen tertentu. Hal ini tentu akan membuat model yang dibangun menjadi susah untuk diinterpretasikan.

Di sisi lain, multikolinearitas juga dapat menyebabkan peningkatan standar error dari koefisien regresi. Hal ini berimplikasi langsung pada pengujian signifikansi variabel independen (uji t), membuat variabel yang seharusnya signifikan dengan pengujian tersebut, menjadi tidak signifikan. Selain itu, dampak lain dari hal tersebut adalah mendistorsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini

diakibatkan karena over-lapping antar variabel independen yang diakibatkan oleh multikolinearitas.

Dalam mendeteksi multikolinearitas terdapat dua indikator utama, Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai Tolerance menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel independen yang dapat diupgrade oleh variabel independen yang lain. Nilai Tolerance yang makin kecil mendekati 0, maka multikolinearitas pada model akan semakin besar. Sebagai kriteria, apabila Tolerance  $\leq 0,10$ , maka terdapat indikasi kuat adanya multikolinearitas pada model. VIF merupakan kebalikan dari nilai Toleransi ( $VIF = 1/\text{Toleransi}$ ). VIF digunakan untuk menunjukkan seberapa besar peningkatan varians koefisien regresi akibat adanya multikolinearitas. Nilai VIF yang lebih besar menunjukkan inflasi varians yang lebih besar. Sebagai aturan praktis,  $VIF \geq 10$  menunjukkan model dengan masalah multikolinearitas yang parah. Jika kedua indikator ini berada dalam batas yang dapat diterima (Toleransi  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ ), model regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji multikolinearitas tidak bergantung pada asumsi normalitas data. Dengan kata lain, meskipun data bersifat lintas negara (dan karenanya heterogen), dan beberapa uji lain (seperti Uji Kruskal-Wallis atau Uji Normalitas Residual) menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, uji multikolinearitas tetap dapat dilakukan. Hal ini karena ada atau tidaknya multikolinearitas hanya bergantung pada ada tidaknya hubungan linear yang berlebihan di antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel                      | Tolerance | VIF   | Keterangan                      |
|-------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| X1. Unemployment              | 0,892     | 1,122 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| X2. GDP                       | 0,263     | 3,807 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| X3. Inflation                 | 0,953     | 1,049 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| X4. Export                    | 0,700     | 1,428 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| X5. Corruption Control        | 0,310     | 3,229 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| X6. Online Work Fragmentation | 0,950     | 1,053 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance  $> 0,10$  serta  $VIF < 10$ . Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multikolinearitas yang serius pada model regresi yang digunakan. Berikut adalah pembahasan masing-masing variabel.

Variabel X1. *Unemployment* (Tingkat Pengangguran), memiliki nilai Tolerance 0,892 dan VIF 1,122. Angka Tolerance yang tinggi ini menunjukkan bahwa proporsi variabilitas dalam pengangguran yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya sangat kecil. VIF yang rendah juga mendukung kesimpulan bahwa variabel ini relatif independen dari variabel lainnya.

Variabel X2. *GDP* (*Gross Domestic Product*) memiliki nilai Tolerance 0,263 dan VIF 3,807. Nilai Tolerance yang lebih rendah, dalam hal ini 0,263, menunjukkan bahwa GDP memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan variabel lain sebagai independen. Meskipun demikian, VIF yang jauh di bawah 10 menunjukkan tidak adanya masalah

multikolinearitas yang serius. Hal ini wajar, mengingat GDP dapat dipengaruhi oleh banyak aspek ekonomi yang juga tercermin dalam variabel-variabel lain.

Variabel X3. *Inflation* (Inflasi), Toleransi menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 0,953, dan VIF yang rendah, yaitu 1,049. Ini berarti variabel inflasi hampir tidak memiliki hubungan linier dengan variabel independen lainnya, yang menegaskan bahwa variabel tersebut tidak menyebabkan multikolinearitas dalam model.

Variabel X4. *Export* (Ekspor), nilai Toleransi tercatat sebesar 0,700, dan VIF sebesar 1,428. Hal ini menunjukkan bahwa untuk variabel ekspor, tidak terdapat hubungan yang kuat dengan variabel lain, sehingga tidak teridentifikasi masalah multikolinearitas.

Variabel X5. *Corruption* (Korupsi), toleransi adalah 0,310, dan VIF adalah 3,229. Seperti halnya PDB, nilai VIF ini relatif tinggi. Meskipun demikian, angkanya masih di bawah ambang batas 10, sehingga tidak terindikasi multikolinearitas yang signifikan. Tidak mengherankan jika terdapat korelasi yang lebih kuat, karena korupsi diketahui berkorelasi kuat dengan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

indikator ekonomi makro lainnya seperti PDB dan tingkat pengangguran.

Variabel X6. *Online Work Fragmentation* (Fragmentasi Kerja Berbasis Platform online) memiliki angka Toleransi 0,950 dan VIF 1,053. Nilai yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa Toleransi fragmentasi kerja berbasis platform bersifat independen terhadap variabel independen lainnya.

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.8 menyimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. Tidak ditemukannya masalah multikolinearitas ini menunjukkan bahwa model eksplanatori yang digunakan tidak saling bertentangan, tidak mengandung hubungan sebab akibat yang tidak proporsional, sehingga dalam perancangan model regresi, koefisien regresi yang diestimasi menjadi lebih

stabil, reliabel, serta hasil interpretasi menjadi lebih akurat. Karenanya, model regresi dapat melanjutkan analisis berikutnya, seperti uji heteroskedastisitas atau uji hipotesis tanpa khawatir ada distorsi akibat multikolinearitas.

## Hasil Uji White (Heteroskedastisitas)

Uji White adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas, yaitu situasi di mana varians residual dalam model regresi tidak konstan terhadap prediktor. Uji White dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat dari model awal pada semua variabel independen, nilai kuadrat variabel independen, dan perkalian silang variabel independen. Jika variabel-variabel ini secara kolektif memengaruhi residual kuadrat, terdapat indikasi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji White

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,647 | 0,418    | 0,410             | 8.197,52                   |

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel *Model Summary*, diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) = 0,418. Nilai  $R^2$  ini selanjutnya digunakan untuk menghitung statistik White dengan rumus:

$$\chi^2_{White} = n \times R^2$$
$$\chi^2_{White} = 934 \times 0,418 = 390,41$$

dengan:

- $n=934$  (jumlah observasi),
- $R^2=0,418$

Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas, nilai  $\chi^2_{White}$  dibandingkan dengan  $\chi^2$  tabel pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan derajat kebebasan (df) yang sesuai.

Pada model ini terdapat 6 variabel independen dan 6 variabel kuadrat, sehingga total variabel pada regresi tambahan adalah 12 variabel. Dengan demikian, derajat kebebasan (df) = 12, dan berdasarkan tabel Chi-Square:

$$\chi^2_{tabel}(0,05;12)=21,026$$
$$\chi^2_{White} > \chi^2_{tabel}$$
$$(390,41 > 21,026)$$

Dengan jumlah observasi  $n=934$ , diperoleh statistik uji  $\chi^2_{White}=390,41$ . Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai kritis Chi-Square ( $\chi^2$  tabel) pada derajat kebebasan yang sesuai. Apabila:

- $\chi^2_{White} > \chi^2_{tabel}$  : terdapat indikasi heteroskedastisitas.
- $\chi^2_{White} \leq \chi^2_{tabel}$  : model bebas dari heteroskedastisitas.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa  $\chi^2_{White} > \chi^2_{tabel}$  ( $390,41 > 21,026$ ) maka terdapat indikasi heteroskedastisitas.

Dikarenakan hasil uji White menunjukkan adanya heteroskedastisitas, langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah menggunakan metode estimasi yang robust terhadap heteroskedastisitas seperti Generalized Least Squares (GLS) atau White's robust standard errors.

## Robust Standard Error (White's robust standard errors)

Sebagai langkah memperbaiki model setelah heteroskedastisitas terdeteksi pada uji White, dilakukan pemisahan dengan Retrofit metod error yang lebih kokoh atau Robust Standard Error. Tujuan dari metod ini adalah menghitung kembali standarisasi error sehingga tidak dipengaruhi oleh residuoan yang variansnya tidak stabil. Hasil dari ujicoba yang dilakukan dengan metod yang lebih kokoh, dengan pemakain Generalized Linear Models (GLM) ditampilkan pada Tabel Parameter Estimates di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Robust Standard Error

| Parameter | Nilai (B) | Confidence Interval 95% | p-value (Sig.) | Keterangan |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------|------------|
| Intercept | 181,264   | 177,334 – 185,194       | 0,000          | Signifikan |

Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien Intercept B sebesar 181,264 menunjukkan intercept atau titik awal model regresi, yaitu nilai variabel dependen ketika semua variabel independen bernilai nol. Selanjutnya, Confidence Interval 95% berada pada rentang 177,334 hingga 185,194, yang berarti kita yakin sebesar 95% bahwa nilai intercept yang sebenarnya berada di dalam rentang tersebut. Terakhir, p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan

bahwa intercept ini signifikan secara statistik. Artinya, nilai intercept tersebut benar-benar berpengaruh dalam model dan bukan terjadi secara kebetulan. Dengan kata lain, heteroskedastisitas memang ada, tetapi hasil uji hipotesis masih valid karena error baku telah disesuaikan.

Penerapan Robust Standard Error sangat penting karena data bersifat lintas negara dengan karakteristik ekonomi yang bervariasi. Variasi tersebut

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sangat mungkin menyebabkan heteroskedastisitas, sehingga ketergantungan pada OLS standar akan menghasilkan kesimpulan yang bias.

Melalui penerapan estimasi robust, koefisien regresi tetap valid sesuai hasil estimasi OLS awal, sehingga arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tetap tidak berubah. Selain itu, error baku estimasi lebih akurat, sehingga memudahkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Pendekatan ini memiliki manfaat tambahan karena memungkinkan penelitian untuk bekerja dengan data mentah tanpa perlu mengeliminasi variabel yang diduga berkontribusi terhadap heteroskedastisitas, sehingga menjaga integritas informasi dalam data.

## 4.3 Uji Hypothesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan meregresikan variabel dependen yaitu shadow economy dengan variabel dependen untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau 0,05, berikut ini dipaparkan hasil pengujian regresi linear berganda.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

| Model | R Square | Adjusted R Square |
|-------|----------|-------------------|
| 1     | 0,0845   | 0,0785            |

Dari table diatas, dapat diamati bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,0785 menunjukkan bahwa sekitar 7,85% dari variasi ekonomi bayangan dapat dijelaskan oleh enam variabel independen yang dimasukkan dalam model. Sementara itu, sisa 92,15% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Mengenai temuan dalam model ini, jelas bahwa pengaruh kolektif dari enam variabel adalah signifikan, tetapi kekuatan penjelasan model terkait ekonomi bayangan cukup rendah ( $\text{Adjusted } R^2 < 0.1$ ). Ini menunjukkan bahwa ekonomi bayangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, PDB, ekspor, dan korupsi, serta faktor digital seperti fragmentasi kerja secara online, tetapi juga secara struktural dan institusional oleh kualitas pemerintah, ketidaksetaraan pendapatan, literasi digital, atau kapasitas pajak nasional.

Nilai Adjusted R<sup>2</sup> yang rendah juga dapat mencerminkan kompleksitas dan keunikan struktur ekonomi bayangan di berbagai negara. Oleh karena itu, meskipun variabel yang digunakan dalam penelitian ini

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R Square, atau koefisien determinasi, adalah ukuran statistik dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi variabel dependen (Y) dijelaskan oleh variabel independen (X) dalam model. Nilai R square berkisar antara nol hingga satu. Semakin dekat nilai tersebut ke 1, semakin besar variabilitas Y yang dapat dijelaskan oleh X. Sementara itu, semakin dekat nilai tersebut ke 0, semakin sedikit kontribusi X terhadap perubahan Y.

Dalam konteks penelitian ini, R Square memperkirakan bahwa ekonomi bayangan dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran, PDB, inflasi, ekspor, korupsi, dan fragmentasi pekerjaan online. Namun, dalam kasus menggunakan data panel atau data lintas negara, ada risiko fluktuasi dalam kelompok yang dibuat, sehingga lebih tepat menggunakan Adjusted R Square, yang telah disesuaikan nilai R square-nya dengan jumlah variabel independen dalam model, sehingga mengukur model dengan lebih akurat untuk evaluasi regresi.

didasarkan pada landasan teoretis yang solid, keberagaman konteks negara memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif atau pemodelan tambahan, seperti interaksi variabel, analisis kluster, atau model panel dengan efek tetap/random.

## Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian secara bersama-sama terhadap variabel independen, dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel- variabel independen dinyatakan signifikan mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 . Karena F-hitung (14,262) > F-tabel (2,10), dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Unemployment, GDP, Inflation, Export, Corruption Control, dan Online Work Fragmentation secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen Shadow Economy.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

| Model      | F      | F tabel | Sig.               |
|------------|--------|---------|--------------------|
| Regression | 14,262 | 2,10    | 0,000 <sup>a</sup> |

## Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Parsial (uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri – sendiri terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai signifikansi t hitung lebih besar daripada  $\alpha = 5\%$  berarti variabel independen

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai signifikansi t hitung lebih kecil daripada  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji T)

| Variabel Independen            | Hipotesis Awal | Koefisien (B) | t-hitung | t-tabel | Sig.  | Keputusan Hipotesis                          |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------|---------|-------|----------------------------------------------|
| Unemployment (X1)              | Positif        | -1,572        | -7,291   | 1,96    | 0,000 | H1 ditolak (berpengaruh negatif signifikan)  |
| GDP (X2)                       | Negatif        | -0,001        | -3,935   | 1,96    | 0,000 | H2 diterima (berpengaruh negatif signifikan) |
| Inflation (X3)                 | Positif        | -0,516        | -3,192   | 1,96    | 0,001 | H3 ditolak (berpengaruh negatif signifikan)  |
| Export (X4)                    | Negatif        | 0,164         | 2,399    | 1,96    | 0,017 | H4 ditolak (berpengaruh positif signifikan)  |
| Corruption Control (X5)        | Positif        | 0,729         | 3,950    | 1,96    | 0,000 | H5 diterima (berpengaruh positif signifikan) |
| Online Work Fragmentation (X6) | Positif        | -0,938        | -0,992   | 1,96    | 0,322 | H6 ditolak (tidak berpengaruh signifikan)    |

Hasil dari analisis regresi linier berganda dengan ekonomi bayangan sebagai variabel dependen menunjukkan bagaimana setiap variabel independen berkontribusi baik secara signifikan atau sama sekali tidak terhadap perubahan kegiatan ekonomi bayangan di negara-negara yang diamati. Setiap koefisien regresi akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Variabel *unemployment* atau pengangguran (X1) Pada hipotesis awal variabel pengangguran (X1) diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap Ekonomi Bayangan. Namun, hasil pengujian menunjukkan koefisien negatif sebesar -1,572 dengan nilai  $t = -7,291 < -1,96$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan, namun dengan arah yang berlawanan dari asumsi awal, yaitu peningkatan pengangguran menurunkan aktivitas Ekonomi Bayangan. Temuan ini dapat dipahami karena berkurangnya kapasitas produktif penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tidak resmi di sektor informal dengan menganggur, terutama di negara yang modal, keterampilan, dan peluang usahanya sangat terbatas pada sektor informal. Selain itu, di negara yang mempunyai sistem jaminan sosial yang kuat, pengangguran yang meningkat cenderung mendorong masyarakat untuk lebih bergantung pada pemerintah dan tidak mencari pendapatan melalui ekonomi bayangan. Akibatnya, daya beli dan permintaan terhadap barang dan jasa pada sektor informal menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan pengangguran dan Ekonomi Bayangan dipengaruhi negara-negara dengan karakteristik struktural, sehingga berbeda dari harapan awal yang umumnya berpendapat bahwa pengangguran mendorong perkembangan ekonomi bayangan.

Variabel GDP (X2) Sesuai dengan hipotesis awal, variabel diasumsikan memiliki pengaruh negatif terhadap Ekonomi Bayangan. Pengujian yang dilakukan menyokong hipotesis tersebut, di mana diperoleh koefisien regresi negatif sebesar -0,001 dengan nilai  $t = -3,935 < -1,96$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Kondisi ini menunjukan bahwa peningkatan PDB per kapita secara signifikan menghambat pertumbuhan Ekonomi Bayangan. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik umumnya memiliki infrastruktur kelembagaan yang lebih baik, diantaranya

sistem pengawasan fiskal dan penegakan hukum yang lebih efisien. Semua ini mengakibatkan insentif yang lebih kecil untuk beroperasi di luar sistem formal bagi para pelaku ekonomi. Di samping itu, lebih tingginya PDB per kapita di suatu negara, berkaitan umumnya dengan daya beli masyarakat serta kepatuhan atas pajak, yang membuat adanya penurunan pada aktivitas ekonomi informal. Temuan tersebut berkontribusi dengan teori yang menyatakan bahwa perbaikan pada keadaan ekonomi secara menyeluruh, akan mengecilkan ukuran Ekonomi Bayangan.

Variabel Inflasi (x3) menunjukkan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap ekonomi bayangan, yang konsisten dengan asumsi awal. Koefisien regresi sebesar 0,516 dengan nilai  $t = -3,192 < -1,96$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  menunjukkan bahwa inflasi secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi bayangan. Temuan ini dapat dijelaskan oleh mekanisme kebijakan moneter terhadap negara-negara dengan inflasi yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut, yang mencakup kenaikan suku bunga dan kontrol ketat terhadap peredaran uang, cenderung membatasi fleksibilitas sektor informal dalam memindahkan uang. Selain itu, inflasi menekan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi dan peluang investasi di sektor informal berkurang.

Variabel ekspor (x4) setelah dilakukan pengujian koefisien regresi sebesar 0,164 dengan nilai  $t = 2,399 > 1,96$  dan signifikansi  $0,017 < 0,05$ , mengonfirmasi hipotesis bahwa ekspor berdampak positif terhadap perekonomian. Hal ini menegaskan asumsi bahwa ekspor berkorelasi positif dengan ekonomi bayangan. Hal ini berkaitan dengan lemahnya penegakan peraturan perdagangan perbatasan di beberapa negara sampel. Dalam kondisi seperti itu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kesenjangan kepatuhan untuk bertransaksi di luar pembukuan dengan menilai barang ekspor terlalu rendah atau terlalu tinggi, yang kemudian merangsang ekonomi informal.

Variabel *corruption control* (x5) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Ekonomi Bayangan sebagaimana yang diharapkan dari hipotesis. Koefisien regresi sebesar 0,729 dengan  $t = 3,950 > 1,96$ , dan signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi memperluas ukuran Ekonomi Bayangan. Hal ini disebabkan korupsi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membuat sistem perpajakan dan penegakan hukum menjadi tidak efektif, sehingga mendorong penghindaran kewajiban formal. Lebih lanjut, korupsi meningkatkan biaya operasional sektor formal, yang memaksa pelaku usaha untuk beroperasi di sektor informal guna menghindari beban birokrasi dan pungutan tidak resmi.

Variabel *Online work fragmentation* (X6) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap Ekonomi Bayangan, sehingga hipotesis awal tidak terdukung. Koefisien regresi sebesar -0,938 dengan nilai  $t -0,992 < 1,96$  dan nilai  $p 0,322 > 0,05$  menunjukkan bahwa aktivitas digital berbasis platform tidak secara konsisten mendorong pertumbuhan Ekonomi Bayangan, terutama dalam konteks internasional. Hal ini dapat dijelaskan oleh kombinasi undang-undang ketenagakerjaan digital yang berbeda dan tingkat penetrasi teknologi yang berbeda di berbagai negara. Di negara-negara dengan ekosistem digital yang mapan dan struktur pelaporan yang terintegrasi, pekerjaan jarak jauh cenderung tercakup dalam sistem ketenagakerjaan formal. Sebaliknya, di negara-negara dengan regulasi yang lebih lemah, pekerjaan jarak jauh dapat mendorong lapangan kerja informal, tetapi dampak keseluruhannya terlalu kecil untuk konsisten.

## Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11, Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pengangguran (X1) berpengaruh positif terhadap Shadow Economy justru tidak terdukung. Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien negatif sebesar -1,572 dengan nilai  $t -7,291 < -1,96$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran justru menurunkan aktivitas ekonomi bayangan. Hal ini dapat dijelaskan oleh berkurangnya kapasitas produktif penduduk yang menganggur untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi informal, terutama di negara-negara dengan akses modal dan keterampilan yang terbatas. Selain itu, di negara dengan sistem jaminan sosial yang kuat, peningkatan pengangguran mendorong masyarakat lebih bergantung pada bantuan pemerintah daripada mencari pendapatan di sektor informal. Temuan ini berbeda dengan penelitian Nchor (2021), Schneider (2022), Remeikienė et al., (2022), Abada et al., (2021), Poufinas et al., (2021), Tran (2021) dan Zhanabekov, (2022) yang menemukan hubungan positif antara pengangguran dan Shadow Economy di negara-negara Eropa Timur. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik lintas negara dalam penelitian ini yang mencakup negara dengan sistem sosial yang lebih kuat sehingga pengangguran tidak serta merta mendorong ekspansi Shadow Economy.

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (X2) berpengaruh negatif terhadap Shadow Economy terdukung oleh hasil penelitian. Koefisien regresi yang diperoleh adalah -0,001 dengan nilai  $t -3,935 < -1,96$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Peningkatan PDB per kapita secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi bayangan. Negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih

tinggi cenderung memiliki sistem perpajakan dan penegakan hukum yang lebih baik serta infrastruktur kelembagaan yang lebih kuat sehingga mengurangi insentif pelaku ekonomi untuk beroperasi di luar sistem formal. Selain itu, peningkatan PDB per kapita juga mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih baik, yang menurunkan ketergantungan pada sektor informal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ginevicius et al., (2020), Nchor (2021), Poufinas et al., (2021) dan Tran, (2021), yang menemukan hubungan negatif antara PDB per kapita dan Shadow Economy.

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa inflasi (X3) berpengaruh positif terhadap Shadow Economy juga tidak terdukung. Koefisien regresi yang diperoleh adalah -0,516 dengan nilai  $t -3,192 < -1,96$  dan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa inflasi justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Shadow Economy. Temuan ini dapat dijelaskan karena inflasi yang tinggi mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat seperti kenaikan suku bunga dan pengendalian arus uang yang pada akhirnya membatasi fleksibilitas sektor informal dalam menjalankan aktivitasnya. Inflasi juga menekan daya beli masyarakat sehingga konsumsi dan permintaan barang serta jasa di sektor informal ikut menurun. Hasil ini berbeda dengan temuan Tran (2021) dan Kravchenko et al., (2022) yang menemukan hubungan positif antara inflasi dan Shadow Economy, khususnya di negara berkembang, perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi kebijakan moneter dan kapasitas pengawasan di negara-negara sampel penelitian ini.

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa ekspor (X4) berpengaruh negatif terhadap Shadow Economy tidak terdukung. Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,164 dengan nilai  $t 2,399 > 1,96$  dan signifikansi  $0,017 < 0,05$  yang berarti peningkatan ekspor secara signifikan memperluas aktivitas ekonomi bayangan. Hal ini dapat dijelaskan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi perdagangan lintas batas di beberapa negara sampel, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan celah untuk melakukan praktik informal seperti undervaluation atau overvaluation barang ekspor demi menghindari beban pajak. Temuan ini berbeda dengan hasil (Poufinas et al., 2021) yang menemukan bahwa ekspor dapat menekan Shadow Economy karena mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap standar perdagangan internasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perdagangan antarnegara dapat memengaruhi arah hubungan antara ekspor dan Shadow Economy.

Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh positif terhadap Shadow Economy terdukung sepenuhnya oleh hasil penelitian. Koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,729 dengan nilai  $t 3,950 > 1,96$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi memperluas ukuran ekonomi bayangan. Korupsi menyebabkan melemahnya sistem perpajakan, menurunnya efektivitas penegakan hukum, dan meningkatnya biaya untuk beroperasi di sektor formal sehingga pelaku usaha lebih memilih beroperasi di sektor informal. Hasil ini konsisten dengan Penelitian

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Kristianto, 2021) serta Yefimenko and Dobomenko, (2024) yang menemukan bahwa korupsi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Shadow Economy, khususnya di negara dengan sistem hukum yang lemah.

Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa fragmentasi pekerjaan daring (X6) berpengaruh positif terhadap Shadow Economy tidak didukung oleh hasil penelitian. Koefisien regresi yang diperoleh adalah  $-0,938$  dengan nilai  $t$   $-0,992 < 1,96$  dan signifikansi  $0,322 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa fragmentasi pekerjaan daring tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Shadow Economy. Temuan ini dapat dijelaskan oleh adanya disparitas regulasi ketenagakerjaan digital dan tingkat penetrasi teknologi antarnegara yang sangat bervariasi. Di negara dengan ekosistem digital yang matang, pekerjaan daring umumnya tercatat dalam sistem formal. Sebaliknya, di negara dengan regulasi lemah, pekerjaan daring dapat memicu pertumbuhan sektor informal, tetapi efeknya tidak cukup besar untuk signifikan pada level lintas negara. Temuan ini berbeda dengan hasil Remeikienė et al., (2022) yang menemukan bahwa ekspansi ekonomi digital cenderung meningkatkan Shadow Economy, perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh konteks lintas negara yang beragam pada penelitian ini.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Variabel Pengangguran (X1) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap *Shadow economy*. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi bayangan. Logikanya, pengangguran yang lebih tinggi mengurangi produktivitas masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi informal sekalipun. Di negara-negara dengan sistem jaminan sosial, individu yang menganggur cenderung lebih bergantung pada bantuan pemerintah selama periode pengangguran dibandingkan mencari penghasilan di ekonomi informal. Hal ini mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, penurunan permintaan barang dan jasa di sektor informal, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan *shadow economy*.

Variabel GDP (X2) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap Ekonomi Bayangan. Peningkatan GDP per kapita yang merupakan indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat menyebabkan penurunan aktivitas *shadow economy*. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih tinggi biasanya memiliki infrastruktur kerangka kelembagaan, pengawasan fiskal, dan perpajakan yang lebih maju, yang secara kolektif mengurangi insentif bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi di sektor informal. Selain itu, perekonomian penduduk berfungsi untuk meningkatkan permintaan produk dan jasa yang tersedia di pasar, sehingga meningkatkan nilai perekonomian dan mengurangi ekonomi bayangan.

Variabel *Inflation* (X3) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap *shadow economy*. Inflasi yang lebih tinggi biasanya disertai dengan kebijakan moneter ekspansif seperti kenaikan suku bunga dan pembatasan peredaran uang. Kondisi ini membatasi fleksibilitas sektor informal dalam memperoleh modal dan bertransaksi di luar sistem resmi. Selain itu, inflasi menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi di sektor informal. Semua faktor ini secara kumulatif berkontribusi terhadap penurunan ekonomi bayangan seiring dengan kenaikan inflasi.

Dampak variabel *export* (X4) ditemukan berkorelasi signifikan dan positif dengan *shadow economy*. Peningkatan ekspor terlihat meningkatkan peluang pengusaha untuk memanfaatkan celah dalam kendali perdagangan lintas batas, terutama di negara-negara dengan tata kelola yang buruk. Ekonomi informal semakin berkembang dengan maraknya praktik penilaian barang ekspor yang terlalu rendah atau terlalu tinggi untuk menghindari pajak dan bea. Lemahnya penegakan hukum kerja sama antarnegara juga mendorong pengusaha untuk beroperasi di luar sistem formal.

Variabel *corruption control* atau Pengendalian Korupsi (X5) terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap *shadow economy*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengendalian korupsi, semakin besar pula penghindaran sektor formal oleh pelaku ekonomi, yang mengarah pada perluasan kegiatan *shadow economy*. Hal ini masuk akal, karena pengendalian korupsi yang lebih kuat seringkali disertai dengan kerangka regulasi sektor formal yang lebih ketat, sehingga meningkatkan biaya kepatuhan serta risiko kepatuhan bagi pelaku ekonomi. Beberapa pelaku usaha cenderung menghindari beban kepatuhan yang lebih tinggi dengan beralih ke sektor informal yang kurang teregulasi, sehingga memperluas *shadow economy*.

Variabel *online work fragmentation* atau Fragmentasi Pekerjaan Daring (X6) tidak memiliki dampak signifikan terhadap *shadow economy*. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan yang diciptakan oleh disparitas regulasi ketenagakerjaan digital serta tingkat penetrasi teknologi suatu negara. Di negara-negara dengan ekosistem digital yang mapan, pekerjaan daring sebagian besar terformalisasi. Sebaliknya, negara-negara dengan regulasi yang rendah cenderung memungkinkan pekerjaan daring untuk memperluas ekonomi informal. Namun demikian, karakteristik ini meredam dampak variasi lintas negara dari karakteristik ini.

### Implikasi

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting baik bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun praktisi. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi sebagai langkah strategis untuk menekan Shadow Economy. Tingginya pengaruh variabel korupsi menunjukkan bahwa kebijakan penguatan integritas dan transparansi birokrasi dapat berdampak signifikan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam memperluas basis pajak dan mengurangi aktivitas ekonomi bayangan.

Selain itu, hasil penelitian mengenai PDB per kapita dan inflasi menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga mampu mempersempit ruang gerak Shadow Economy. Sementara itu, temuan bahwa ekspor dapat meningkatkan aktivitas Shadow Economy menandakan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam mekanisme perdagangan lintas batas. Integrasi sistem digitalisasi bea cukai, pemantauan harga transfer, serta harmonisasi peraturan ekspor-impor antarnegara dapat mengurangi peluang praktik informal di sektor perdagangan internasional.

Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor penentu Shadow Economy, khususnya dalam konteks lintas negara dengan heterogenitas karakteristik ekonomi. Hasil ini juga membuka ruang penelitian lanjutan mengenai peran ekonomi digital dan fragmentasi kerja berbasis platform yang dalam penelitian ini tidak terbukti signifikan.

## Keterbatasan

Meski penelitian ini telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih dalam. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan lintas negara (cross-country) dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan temuan yang diperoleh bersifat agregat dan tidak dapat sepenuhnya menggambarkan serta dipersepsi menjelaskan setiap negara secara komprehensif. Kedua, pengukuran Shadow Economy yang digunakan bersumber dari data estimasi, yang artinya mengandung potensi measurement error yang dapat mengkritisi keakuratan analisis yang dilakukan.

Ketiga, dalam penelitian ini, penulis dibatasi pada penggunaan data variabel makroekonomi dan kelembagaan yang diunggah dalam publikasi internasional. Beberapa variabel seperti tingkat pendidikan, penegakan hukum, dan tingkat inklusi keuangan yang berkorelasi memengaruhi Shadow Economy tidak diperhitungkan lebih dalam karena terbatasnya data. Keempat, penggunaan variabel Online Work Fragmentation yang masih konseptual serta memiliki keterbatasan dalam akurasi pengukuran lintas negara mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan realita.

## Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian saat ini. Sebagai langkah awal, penelitian mendatang sebaiknya mempertimbangkan struktur waktu ekonomi bayangan, dengan melihat dinamika temporal pengaruh variabel independen menggunakan data panel dan data deret waktu pada ekonomi bayangan untuk studi dampak. Kasus lain, untuk variabel yang bersifat konseptual seperti Fragmentasi Pekerjaan Daring, perlu dikembangkan indikator yang lebih presisi dan terukur, yang dapat berupa kombinasi data survei dan big data dari platform digital yang relevan.

Selanjutnya dalam rangkaian penelitian ini, variabel kelembagaan yang lebih detail seperti indeks

penegakan hukum, serta kualitas sistem perpajakan dan tingkat literasi keuangan masyarakat yang diyakini berdampak pada partisipasi dalam Ekonomi Bayangan, dapat ditambahkan. Lebih lanjut, dari perspektif pembuat kebijakan, perlu ditingkatkan pengawasan lintas batas terhadap aktivitas ekspor dan impor melalui sistematisasi kepabeanan, kerangka hukum internasional, dan sistem regulasi secara keseluruhan. Masih diperlukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi prosedur birokrasi dengan tujuan membatasi ekonomi bayangan. Terakhir, kerangka kerja metode campuran yang menangkap dimensi kuantitatif dan kualitatif dari fenomena yang berkembang pesat ini dapat dirancang untuk mengeksplorasi dampak ekonomi digital terhadap Ekonomi Bayangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abada, F.C., Nwakoby, I.C., Iroegbu, N.F., Okoh, J.I., Lawal, A.I., Asogwa, O.J., 2021. Relationship Between Unemployment Rate and Shadow Economy in Nigeria: A Tado-Yamamoto Approach. *Int. J. Financ. Res.* 12, 271–283. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n3p271>
- Achim, M.V., Borlea, A., Găban, B., 2019. The Shadow Economy and Culture: Evidence in European Countries. *East. Eur. Econ.* 1–23. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1614461>
- Azhar, F.H., Sohibien, G.P.D., 2021. Kajian Underground Economy dan Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Semin. Nas. Off. Stat.* 2020, 539–548. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.415>
- Buszko, A., 2022. Factors Fostering Shadow Economy Performance in Poland and Lithuania during 2000–2019. *Inzinerine Ekon.-Eng. Econ.* 33, 4–12. <http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.33.1.24944>
- Bytyçi, S., Shala, V., Ziberi, B., Myftaraj, E., 2021. Transforming traditional business into online: The impact of COVID-19 pandemic on consumer behavior. *J. Gov. Regul.* 10, 300–308. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart10>
- Gërzhani, K., Cichocki, S., 2023. Formal and informal institutions: understanding the shadow economy in transition countries. *J. Institutional Econ.* 19, 656–672. <https://doi.org/10.1017/S1744137422000522>
- Ginevicius, R., Klietis, T., Stasiukynas, A., 2020. The Impact of National Economic Development on the Shadow Economy. *J. Compet.* 12(3), 39–55. <https://doi.org/10.7441/joc.2020.04.03>
- Ishchuk, M., Diedkov, M., Khrypko, S., Oblova, L., Binkivska, K., Syhyda, H., Turchyn, M., 2024. Navigating Precarity: Political Struggles and the Impact on the Shadow Economy. *Eur. J. Sustain. Dev.* 13, 156. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2024.v13n2p156>

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kibona, L., 2024. Profit Meets Purpose: How Blockchain is Transforming Sustainable Digital Entrepreneurship in Iringa Municipal, Tanzania. *Int. J. Recent Eng. Sci.* 11, 1–16. <https://doi.org/10.14445/23497157/IJRES-V11I6P101>
- Kravchenko, V., Karapetov, V., Nechepurenko, I., 2022. Econometric analysis of influence by the factors on the volume of shadow economy in the countries of Europe. *J. Financ. Crime.* <https://doi.org/DOI: 10.1108/JFC-08-2022-0176>
- Kristianto, A., 2021. Tindak Pidana Korupsi Dan Aktivitas Underground Economy. *Bina Ekon.* 23, 78–102. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.4251.78-102>
- Lestari, D., Hudayah, S., Busari, A., 2022. Understanding The Shadow Economy in SME's A Malpractice From Indonesia 2009-2020. *Media Ekon. Dan Manaj.* 37, 77–95.
- Malik, R., Visvizi, A., Skrzek-Lubasińska, M., 2021. The Gig Economy: Current Issues, the Debate, and the New Avenues of Research. *Sustainability* 13, 5023. <https://doi.org/10.3390/su13095023>
- Nehor, D., 2021. Shadow economies and tax evasion: The case of the Czech Republic, Poland and Hungary. *Soc. Econ.* 43, 21–37. <https://doi.org/DOI: 10.1556/204.2020.00029>
- Poufinas, T., Galanos, G., Agiropoulos, C., 2021. The Impact of Competitiveness on the Shadow Economy. *Int. Atl. Econ. Soc.* 27, 29–46. <https://doi.org/10.1007/s11294-021-09820-9>
- Remeikiene, R., 2021. Nexus between unemployment and the shadow economy in Lithuanian regions during the COVID-19 pandemic. *J. Int. Stud.* 14, 59–72. <https://doi.org/doi:10.14254/2071-8330.2021/14-3/4>
- Remeikienė, R., Gasparėnienė, L., Bayar, Y., Ginevičius, R., Ragaišytė, I.M., 2022. ICT development and shadow economy: Empirical evidence from the EU transition economies. *Econ. Res.-Ekon. Istraživanja* 35, 762–777. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1932545>
- Rezky, N.P., 2021. Kajian Kegiatan Shadow Economy Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *J. Akunt. Bisnis Dan Ekon.* 6, 1671–1680. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss2.2020.617>
- Schneider, F., 2022. New COVID-related results for estimating the shadow economy in the global economy in 2021 and 2022. *Int. Econ. Econ. Policy* 19, 299–313. <https://doi.org/10.1007/s10368-022-00537-6>
- Tran, T.K.P., 2021. Unemployment and Shadow Economy in ASEAN Countries. *J. Asian Finance Econ. Bus.* 8, 0041–0046. <https://doi.org/doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no11.0041>
- Tudose, Mihaela, B., Raluca, I., 2016. An Analysis of the Shadow Economy in EU Countries. *CES Work. Pap. Vol. 8*, 303–312.
- Wood, A.J., Graham, M., Lehdonvirta, V., Hjorth, I., 2019. Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy. *Work Employ. Soc.* 33, 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>
- Yefimenko, A., Dobomenko, M., 2024. Trends in Corruption and Shadow Economy in European Countries. *Econ. Financ.* 5, 112–117. <https://doi.org/10.37634/efp.2024.5.21>
- Zhanabekov, S., 2022. Robust determinants of the shadow economy. *Bull. Econ. Res.* 74, 1017–1052. <https://doi.org/DOI: 10.1111/boer.12330>